

**PERAN *STICHTING NEDERLANDSE VRIJWILLIGERS (SNV)* DALAM
PENERAPAN *SUSTAINABLE SANITATION AND HYGIENE
FOR ALL (SSH4A) IN SMALL TOWNS PROGRAMME*
DI KABUPATEN PRINGSEWU**

(Skripsi)

Oleh

DARA PUSPITASARI



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRACT

THE ROLE OF STICHTING NEDERLANDSE VRIJWILLIGERS IN APPLYING SUSTAINABLE SANITATION AND HYGIENE FOR ALL (SSH4A) IN SMALL TOWNS PROGRAMME IN PRINGSEWU DISTRICT

BY

DARA PUSPITASARI

This research aims to analyze the role of Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV) in applying Sustainable Sanitation and Hygiene for All (SSH4A) in Small Towns Programme in Pringsewu district. The framework of analyses used in this research are role theory, NGO's role concept, networking concept, and sustainable development concept. The author uses a case study design. Through analysis of the various documents, books, journals, observation, and interviews with three experts in the field of development and environmental issues, the author argues that the role of SNV in applying SSH4A program is intended to achieve one of the sustainable development goals, namely universal sanitation. The role made considering the problems of sanitation and hygiene which can threaten the existence of human's life, and the role of local government is still suboptimal. This research finds that there are some SNV's roles in the application of SSH4A program in Pringsewu district, such as the development and operation of infrastructure; supporting innovation; demonstration, and pilot project; facilitating communication; technical assistance and training; research, monitoring, and evaluation; and advocacy for and with the poor. This research also gives an overview of the networking which is SNV made in order to support the implementation of this program. The result of this research shows that the application of the SSH4A program in the Pringsewu district had been relatively successful.

Key words: NGO, Stichting Nederlandse Vrijwilligers, SSH4A, Pringsewu, sanitation and hygiene, networking, sustainable development.

ABSTRAK

PERAN *STICHTING NEDERLANDSE VRIJWILLIGERS* (SNV) DALAM PENERAPAN *SUSTAINABLE SANITATION AND HYGIENE FOR ALL* (SSH4A) IN *SMALL TOWNS PROGRAMME* DI KABUPATEN PRINGSEWU

Oleh

DARA PUSPITASARI

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis peranan *Stichting Nederlandse Vrijwilligers* (SNV) dalam menerapkan *Sustainable Sanitation and Hygiene for All* (SSH4A) in *Small Towns Programme* di Kabupaten Pringsewu. Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah *role theory*, konsep peranan NGO, jejaring, dan konsep *sustainable development*. Penulis menggunakan desain studi kasus. Melalui analisis terhadap berbagai dokumen, buku, jurnal, observasi, dan wawancara terhadap tiga orang pakar di bidang pembangunan dan permasalahan lingkungan, penulis berargumen bahwa peranan SNV dalam menerapkan program SSH4A dimaksudkan untuk mencapai salah satu tujuan *sustainable development goals*, yakni sanitasi secara universal. Peranan tersebut dilakukan mengingat adanya permasalahan sanitasi dan higiene yang mengancam keberlangsungan hidup manusia, dan belum optimalnya peranan dari pemerintah. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa peran SNV dalam penerapan program SSH4A di Kabupaten Pringsewu, diantaranya *development and operation of infrastructure; supporting innovation, demonstration, and pilot project; facilitating communication; technical assistance and training; research, monitoring, and evaluation; dan advocacy for and with the poor*. Skripsi ini juga memberikan gambaran mengenai jejaring yang diciptakan SNV dalam mendukung penerapan program ini. Hasil penelitian ini memperlihatkan adanya keberhasilan penerapan program SSH4A di Kabupaten Pringsewu.

Kata kunci: NGO, *Stichting Nederlandse Vrijwilligers*, SSH4A, Pringsewu, sanitasi dan higiene, jejaring, *sustainable development*.

**PERAN *STICHTING NEDERLANDSE VRIJWILLIGERS (SNV)* DALAM
PENERAPAN *SUSTAINABLE SANITATION AND HYGIENE
FOR ALL (SSH4A) IN SMALL TOWNS PROGRAMME*
DI KABUPATEN PRINGSEWU**

Oleh

DARA PUSPITASARI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **PERAN STICHTING NEDERLANDSE
VRIJWILLIGERS (SNV) DALAM PENERAPAN
SUSTAINABLE SANITATION AND HYGIENE FOR
ALL (SSH4A) IN SMALL TOWNS PROGRAMME DI
KABUPATEN PRINGSEWU**

Nama Mahasiswa : **Dara Puspitasari**

No. Pokok Mahasiswa : **1316071009**

Jurusan : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.
NIP 19570728 198703 1 006

Iwan Sulisty, S.Sos., M.A.
NIP 19860428 201504 1 004

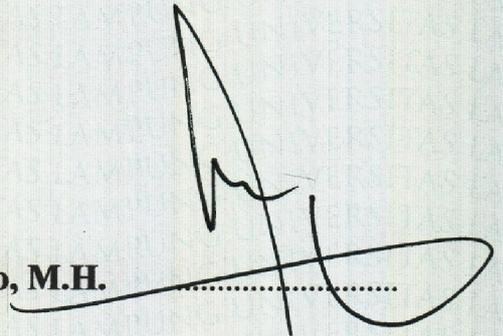
2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.
NIP 19570728 198703 1 006

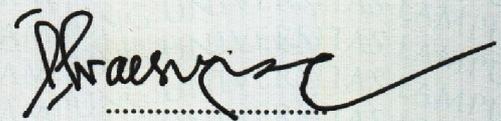
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

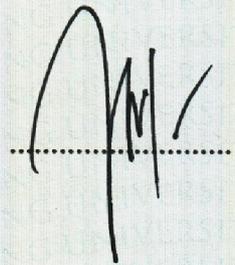
Ketua : **Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.**



Sekretaris : **Iwan Sulisty, S.Sos., M.A.**



Penguji
Bukan Pembimbing: **Prof. Dr. Yulianto, M.S.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya
NIP. 195908031986031003

Tanggal Lulus Ujian : 01 Maret 2017

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 01 Maret 2017

Yang membuat pernyataan,



Dara Puspitasari
NPM. 1316071009

RIWAYAT HIDUP



Dara Puspitasari, dilahirkan di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 29 Agustus 1995, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, dari bapak Drs. Dadan Prasada, M.M. dan ibu Heni Heniawati, S.E.

Jenjang akademis penulis dimulai dengan menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiah Bustanul

Atfa 1 Pringsewu diselesaikan pada tahun 2000, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SD Muhammadiyah Pringsewu pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 22 Bandar Lampung pada tahun 2010, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Pringsewu pada tahun 2013.

Pada tahun 2013, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswa penulis pernah menjadi Sekretaris Departemen Kajian Keilmuan di Organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional (HMJHI) FISIP Unila dan aktif di organisasi eksternal di bidang lingkungan hidup, yaitu sebagai anggota aktif dalam Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan Kabupaten Pringsewu.

Pada tahun 2016, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 60 hari di Desa Bakung Rahayu, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang. Dan pada tahun yang sama, penulis juga melakukan kerja praktik atau magang di *Stichting Nederlandse Vrijwilligers* (SNV) Lampung.

MOTTO

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang(dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu”. (QS. Ath-Thalaq 1-3)

“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever” (Mahatma Gandhi)

"Intelligent people are not the people who feel smart, but they are people who feel stupid, so they will never cease to continue learning". (Dara Puspitasari)

PERSEMBAHAN

Teruntuk Ayahanda Dadan Prasada dan Ibunda Heni Heniawati tercinta,

hanya sebuah karya sederhana ini yang dapat kupersembahkan.

Ayah, aku ingin engkau merasa bangga atas pencapaian gadis kecilmu ini.

Terkhusus bagi Ibundaku, aku ingin engkau merasa bangga

telah melahirkan gadis kecil ini ke dunia.

Adik-adikku yang kusayang:

Salsabila Ramadhani dan Nisrina Tri Andani

Teruslah menggapai mimpimu.

- Dara Puspitasari -

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi dengan judul “Peran *Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV)* dalam Penerapan *Sustainable Sanitation and Hygiene for All (SSH4A) in Small Towns Programme* di Kabupaten Pringsewu” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si., selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
2. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono, M.H., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Lampung, pembimbing akademik dan pembimbing utama atas kesediannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
3. Bapak Iwan Sulisty, S.Sos., M.Si., selaku pembimbing kedua atas kesedian dan kesabarannya dalam memberikan arahan, bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Bapak Prof. Dr. Yulianto, M.S. selaku penguji pada ujian skripsi. Terima kasih untuk masukan dan saran-saran pada seminar proposal terdahulu;

5. Bapak dan Ibu Dosen Hubungan Internasional Universitas Lampung. Terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang diberikan selama ini;
6. Bapak Bambang P. Atmoko, selaku WASH *Governance* dan narasumber dari pihak SNV Provinsi Lampung. Terima kasih atas bantuan, informasi dan waktunya;
7. Bapak M. Izzudin, selaku *Supply Chain dan Finance* dan narasumber dari pihak SNV Provinsi Lampung. Terima kasih atas bantuan, informasi dan waktunya;
8. Bapak Suparlan, selaku Ketua Paguyuban Penggiat dan Pengusaha Sanitasi Jamban Sewu. Terima kasih atas waktu dan informasi yang diberikan;
9. Seluruh Kepala Pekon di Kecamatan Pagelaran, terima kasih atas kesediannya dalam menjadi narasumber;
10. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Dadan dan Ibu Heni yang selalu memberikan doa, dukungan materiil dan moril, serta semangat dalam menyusun skripsi;
11. Adik-adikku tercinta, Salsabila dan Nisrina yang telah memberikan semangat dan canda tawa di setiap hariku;
12. Sahabat-sahabatku tersayang, Ruzmalyda, Britaniman, Dita, Clara, Erfinna dan Raissa, terima kasih telah setia menemani sejak awal perkuliahan dan selalu memberikan dukungan dalam menyusun skripsi;
13. Seluruh teman-teman seperjuangan Hubungan Internasional 2013, terima kasih atas moment indah, dukungan, dan semangatnya selama ini;

14. Teman-teman KKN Desa Bakung Rahayu 2016, Acit, Wulan, Bang Deddy, Hendri, dan Tika, terima kasih atas dukungan semangat dan doanya;
15. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih.

Semoga amal kebajikan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini diberikan balasan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amiin.

Bandar Lampung, Maret 2017

Dara Puspitasari

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xix
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Kegunaan Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Penelitian Terdahulu	9
2.2. Landasan Teori	14
2.3. Landasan Konseptual	16
2.4. Kerangka Pemikiran	28
III. METODE PENELITIAN	31
3.1. Tipe Penelitian	31
3.2. Tingkat Analisis	32
3.3. Fokus Penelitian	33
3.4. Lokasi Penelitian	35
3.5. Jenis dan Sumber Data	35
3.6. Teknik Pengumpulan Data	36
3.7. Teknik Analisis Data	37
IV. GAMBARAN UMUM SNV DAN SSH4A IN <i>SMALL TOWNS PROGRAMME</i>	40
4.1. Gambaran Umum SNV	40
4.1.1. Sejarah Singkat	40

4.1.2. Visi dan Misi	42
4.1.3. Pendekatan	43
4.1.4. SNV dan Perwakilan di Negara-Negara	44
4.1.5. Pendanaan	47
4.2. Gambaran Umum SSH4A <i>in Small Towns Programme</i>	48
4.2.1. Peluang	48
4.2.2. Solusi	49
4.2.3. Komponen Program	50
4.2.4. Target Capaian	54
4.3. Gambaran Umum Kabupaten Pringsewu	55
V. PERAN SNV DALAM PENERAPAN SSH4A <i>IN SMALL TOWNS PROGRAMME</i> DI KABUPATEN PRINGSEWU	59
5.1. Peran SNV dalam Penerapan SSH4A <i>in Small Towns Programme</i> di Kabupaten Pringsewu	61
5.1.1. <i>Development and Operation of Infrastructure</i>	61
5.1.2. <i>Supporting Innovation, Demonstration, and Pilot Projects</i>	64
5.1.3. <i>Facilitating Communication</i>	66
5.1.4. <i>Technical Assistance and Training</i>	72
5.1.5. <i>Research, Monitoring and Evaluation</i>	78
5.1.6. <i>Advocacy for and with The Poor</i>	80
5.2. Pembentukan Jejaring	83
5.2.1. <i>Information Politics</i>	90
5.2.2. <i>Leverage Politics</i>	96
5.2.3. <i>Accountability Politics</i>	98
5.3. Hambatan dan Solusi dalam Penerapan SSH4A <i>in Small Towns Programme</i> di Kabupaten Pringsewu	102
5.3.1. Kebiasaan Masyarakat	102
5.3.2. Kesadaran Masyarakat	104
5.3.3. Kemampuan Keuangan Masyarakat	106
5.4. Keberhasilan Penerapan SSH4A <i>in Small Towns Programme</i> di Kabupaten Pringsewu	109
VI. SIMPULAN DAN SARAN	130
6.1. Simpulan	130
6.2. Saran	133
DAFTAR PUSTAKA	135
LAMPIRAN	140
Lampiran 1	
MoU Kementerian Dalam Negeri dan SNV tentang Pembangunan Wilayah Terpadu yang Berkelanjutan	140

Lampiran 2	
Surat Edaran Bupati Pringsewu Nomor: 503/165.C/LT.02/2015	168
Lampiran 3	
Pemetaan ODF di Kecamatan Pagelaran	169
Lampiran 4	
Wawancara dengan Bambang P. Atmoko, <i>WASH Governance</i> Perwakilan SNV Provinsi Lampung	170
Lampiran 5	
Wawancara dengan M. Izzudin, <i>Supply Chain and Finance</i> , Perwakilan SNV Provinsi Lampung	181
Lampiran 6	
Wawancara dengan Suparlan, Ketua PPPS Jamban Sewu	190
Lampiran 7	
Daftar Nama Kepala Pekon di Kecamatan Pagelaran.....	196
Lampiran 8	
Dokumentasi	197

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Tiga Generasi Strategi Program Pembangunan NGO	18
1.2. Promosi Penerapan SSH4A melalui Poster	111
1.3. Promosi Penerapan SSH4A melalui Film	112
1.4. Promosi Penerapan SSH4A melalui Deklarasi ODF	115
1.5. Promosi Penerapan SSH4A melalui Karnaval Jamban	116
1.6. ODF di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu	122
1.7. Progress Penerapan SSH4A di Kabupaten Pringsewu	123
1.8. Prinsip-Prinsip <i>Sustainable Development</i>	126
1.9. Aspek-Aspek Keberhasilan Penerapan SSH4A di Kabupaten Pringsewu	128

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1. Bagan Kerangka Pemikiran	30
1.2. Level Analisis	32
1.3. Persebaran Kantor Perwakilan SNV di Amerika Latin, Asia dan Afrika	45
1.4. Peta Orientasi Kabupaten Pringsewu	56
1.5. Peta Administratif Kabupaten Pringsewu	57
1.6. Struktur Organisasi PPPS Jamban Sewu	63
1.7. Bentuk Komunikasi SNV	70
1.8. <i>Behavioural Change Communication</i>	71
1.9. Pelatihan Produksi Sanitasi Paguyuban	74
1.10. Pelatihan Teknis BANSER	75
1.11. Pelatihan Kapasitas bagi Anggota KORAMIL	77
1.12. Produksi Closet Anggota KORAMIL	77
1.13. Alur Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Penelitian	80
1.14. Jejaring SNV dengan Mitra Kerja sama	84
1.15. <i>Information Politics Strategy</i> dalam Penerapan SSH4A <i>in Small Towns Programme</i> di Kabupaten Pringsewu	95

1.16. <i>Accountability Politics Strategy</i> dalam Penerapan SSH4A <i>in Small Towns Programme</i> di Kabupaten Pringsewu	100
1.17. Festival Kuda Lumping	117

DAFTAR SINGKATAN

AMPL	: Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
BABS	: Buang Air Besar Sembarangan
BANSER	: Badan Ansor Serbaguna
BCC	: <i>Behavioral Change Communication</i>
CCDCP	: <i>Centre for Disease Control and Prevention</i>
CLTS	: <i>Centre Led Total Sanitation</i>
ENGO	: <i>Environmental Non-Governmental Organization</i>
EPI	: <i>Environmental Performance Index</i>
INFID	: <i>International NGO Forum on Indonesian Development</i>
LK21	: Lembaga Konservasi 21
KK	: Kepala Keluarga
KORAMIL	: Komando Rayon Militer
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
ODF	: <i>Opern Defecation Free</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PERMOLESI	: <i>Performance Monitoring, Learning, and Sharing Information</i>
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
SNV	: <i>Stichting Nederlandse Vrijwilligers</i>
SSH4A	: <i>Sustainable Sanitation and Hygiene for All</i>
STBM	: Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
TNC	: <i>The Nature Conservancy</i>
U-IETC	: <i>UNEP-International Environment Technology Centre</i>
UNEP	: <i>United Nations Environmental Programme</i>
WASH	: <i>Water, Sanitation, and Hygiene</i>
WCED	: <i>World Commission on Environment and Development</i>
WI-IP	: <i>Wetlands International-Indonesia Programme</i>

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup dapat diartikan sebagai lingkungan yang digunakan untuk menggambarkan di mana kita dan apa yang melingkupi kita (Steans & Pettford, 2009: 376). Lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah “kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Sejatinya, manusia diberikan tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi lingkungan, sebagaimana makna yang tersirat dari definisi di atas. Permasalahan lingkungan terjadi ketika hal-hal yang seharusnya dilakukan sesuai dengan nilai-nilai kebaikan justru diabaikan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Alhasil, lingkungan pun mengalami kerusakan dan menimbulkan permasalahan lain yang juga berdampak pada kehidupan manusia beserta seluruh makhluk hidup.

Permasalahan lingkungan tidak hanya dialami oleh satu atau dua negara, tetapi juga hampir dirasakan oleh sebagian besar negara yang ada di dunia, terutama negara-negara berkembang (Dasgupta, *et.al*, 1991: 15-16). Dampak yang ditimbulkan pun kian meluas, yang pada akhirnya dapat mengancam kehidupan manusia di dunia. Permasalahan atau isu lingkungan

hidup mulai menjadi pembicaraan global tatkala diselenggarakannya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Lingkungan Hidup di Stockholm, Swedia, pada 15 Juni 1972. Grieger (*Environmental and Society Journal* No. 10., 2012: 690) menyatakan konferensi ini kemudian menjadi pendorong awal kesadaran semua aktor di dunia, baik aktor-aktor negara maupun non-negara, bahwa betapa pentingnya persoalan lingkungan. Hal itu karena permasalahan lingkungan akan saling berkaitan dengan aspek kehidupan yang lain, seperti ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan.

Permasalahan lingkungan terus mengalami perkembangan dan perluasan; yang dapat dirasakan oleh sebagian besar masyarakat di semua belahan dunia. Salah satu permasalahan lingkungan yang memiliki dampak yang massif, tetapi kurang menjadi perhatian masyarakat, ialah soal pengelolaan sanitasi dan higiene (*United Nations Children's Fund Indonesia*, 2012: 1). Sanitasi pada dasarnya merupakan bagian dari komponen kesehatan lingkungan yang dapat diartikan sebagai perilaku yang disengaja untuk membudayakan hidup bersih dan mencegah manusia dari tindakan bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya. Melalui hal-hal tersebut, kesehatan manusia diharapkan dapat terjaga dan meningkat (Mundiatun & Daryanto, 2015: 55-56). Sementara, higiene berarti upaya yang bertujuan untuk melindungi, memelihara, dan dan mempertinggi derajat kesehatan badan dan jiwa. Namun, menurut Mundiatun dan Daryanto (2015: 69-70) hal ini justru tidak sejalan dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

Sanitasi dan higiene sangat penting untuk kesehatan, kelangsungan hidup, dan pengembangan manusia. Dewasa ini, negara-negara ditantang dalam memberikan sanitasi yang memadai untuk seluruh masyarakatnya. Data dari *Centre for Disease Control and Prevention* (<http://www.cdc.gov/healthywater/global/sanitation/index.html>, akses 5 Agustus 2016) menyebutkan, pada tahun 2014 diperkirakan 2.500.000 orang di dunia kekurangan akses sanitasi. Hal ini berarti bahwa lebih dari 35 persen populasi di dunia kekurangan akses sanitasi dasar. Sanitasi dasar digambarkan sebagai akses ke fasilitas untuk pembuangan limbah manusia yang aman (feses dan urine) serta memiliki kemampuan untuk mempertahankan kondisi yang higienis. Berdasarkan data yang dikutip dari *the World Bank* (<http://www.worldbank.org/en/region/eap/publication/east-asia-pacific-region-urban-sanitation-review-actions-needed>, akses 5 Agustus 2016), sebanyak 660.000 orang yang kekurangan sanitasi tersebut berasal dari kawasan Asia Pasifik.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam paragraf sebelumnya bahwa permasalahan terkait pengelolaan sanitasi dan higiene di dunia saat ini cukup memprihatinkan dimana 35 persen populasi di dunia belum dapat mengakses sanitasi dasar. Hal ini tentu dapat menimbulkan terciptanya permasalahan yang kompleks, khususnya yang terkait dengan permasalahan kesehatan. Setiap tahun terdapat 1.400.000 jiwa anak-anak yang meninggal akibat penyakit diare yang disebabkan oleh buruknya pengelolaan sanitasi, termasuk di Indonesia (*the World Bank*, (<http://www.worldbank.org/en/region/eap/publication/east-asia-pacific-region-urban-sanitation-review-acti>

ons-needed, akses 5 Agustus 2016). Indonesia memiliki tantangan besar dalam mengatasi masalah sanitasi dasar bagi rakyatnya. Setengah dari populasi masyarakat Indonesia tidak memiliki akses sanitasi yang layak; sebagaimana dikutip dari laporan *the World Bank*, bahwa “100 juta penduduk Indonesia tidak memiliki toilet dan 57 juta orang melakukan buang air besar sembarangan (BABS) di sungai, laut, kolam bahkan di permukaan tanah, dan 40 juta di antaranya tinggal di pedesaan” (*the World Bank*, 2014: 94-95).

Pada konferensi yang diselenggarakan oleh *the World Bank Water Sanitation Program* diketahui bahwa Indonesia berada di urutan kedua di dunia sebagai negara dengan sanitasi yang buruk. Indonesia sendiri pada tahun 2014 menempati posisi ke-112 dalam *Environmental Performance Index* (EPI) sebagaimana data yang dikutip dari *Yale Center for Environmental Law & Policy* (2014: 10). Permasalahan ini telah menyebabkan kematian sebanyak 15 persen anak-anak yang berumur lima tahun karena diare. Kondisi sanitasi di daerah-daerah pedesaan di Indonesia tampaknya masih sangat memprihatinkan.

Hal ini juga terjadi di Kabupaten Pringsewu, salah satu kabupaten di Provinsi Lampung. Di Kabupaten Pringsewu, pengelolaan limbah tinja dengan cara-cara yang aman hanya mencapai angka 3 persen (SNV, 2014: 1-3). Masih minimnya perubahan perilaku dan keterbatasan sektor informal dalam melakukan praktik-praktik sanitasi serta kebersihan dan pengelolaan air limbah yang baik merupakan tantangan utama dari permasalahan sanitasi di daerah-daerah pedesaan seperti Pringsewu. Hal tersebut mengindikasikan bahwa permasalahan sanitasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten

Pringsewu, tidak cukup baik dan tentunya memerlukan penanganan yang serius.

Uraian di atas menggambarkan bahwa permasalahan sanitasi dan higiene bukanlah persoalan yang remeh. Permasalahan sanitasi dan higiene merupakan suatu permasalahan lingkungan yang akan mengancam keberlangsungan hidup manusia. Akses ke sanitasi merupakan hak dasar manusia yang seharusnya didapatkan oleh seluruh umat manusia di dunia, tidak terkecuali Pringsewu, sebagai daerah pedesaan di Indonesia.

Terkait hal tersebut, permasalahan sanitasi yang begitu buruk menjadi dasar dirumuskannya salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu “tujuan air bersih dan sanitasi untuk semua orang”, dengan salah satu targetnya pada tahun 2030 ialah akan mencapai akses sanitasi dan kebersihan yang memadai dan layak untuk semua orang dan mengakhiri buang air besar sembarangan, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan perempuan dan anak perempuan, serta orang-orang dalam situasi rentan” (*International NGO Forum on Indonesian Development*, 2015: 18).

Ditetapkannya sanitasi sebagai salah satu tujuan dari SDGs, bermakna bahwa semua aktor memiliki tanggung jawab yang sama untuk menyelesaikan permasalahan sanitasi dan higiene yang buruk sekaligus mewujudkan akses sanitasi yang layak bagi semua orang. Sebab, permasalahan ini tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah saja, tetapi juga membutuhkan peran dari sejumlah aktor lain yang secara bersama-sama dapat mengatasi persoalan sekaligus mewujudkan target SDGs.

Dalam upaya tersebut, *Stichting Nederlandse Vrijwilligers* (SNV) merupakan suatu aktor non-negara yang berasal dari Belanda yang berfokus pada pembangunan, khususnya pembangunan di negara-negara berkembang. Ia turut serta dalam upaya untuk mewujudkan tujuan SDGs terkait sanitasi untuk semua orang. Sebagai suatu solusi untuk mengatasi permasalahan sanitasi dan mewujudkan sanitasi yang layak untuk semua orang, SNV menciptakan suatu program yang kemudian disebut sebagai “*Sustainable Sanitation and Hygiene for all (SSH4A) in Small Towns*” (SNV, 2014: 3-4).

Program ini dijalankan di lima kabupaten di Indonesia, termasuk di Kabupaten Pringsewu. Tujuan dari program ini ialah meningkatkan kesehatan dan kualitas kehidupan masyarakat melalui akses terhadap sanitasi yang aman untuk lingkungan dan meningkatkan praktik-praktik kebersihan yang baik. Penerapan program ini telah dimulai sejak tahun 2014. Peran dari SNV dalam mengatasi permasalahan sanitasi ini diharapkan akan menciptakan kerja sama dengan pemerintah lewat tujuan yang sama, yaitu mewujudkan sanitasi untuk semua orang, sebagaimana yang menjadi salah satu tujuan dari SDGs.

Sanitasi dan higiene yang baik dan dapat diakses oleh semua orang akan berdampak positif bagi kondisi lingkungan masyarakat. Kondisi lingkungan yang demikian akan memberikan jaminan atas kesehatan masyarakat yang hidup di dalamnya, yang akan meminimalkan angka kematian anak-anak karena diare akibat lingkungan yang kotor (Mundiatun & Daryanto, 2015: 16-20).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil sebuah rumusan masalah, yaitu “bagaimana peran *Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV) dalam penerapan Sustainable Sanitation and Hygiene for all (SSH4A) in Small Towns Programme* di Kabupaten Pringsewu?”.

1.3. Tujuan Penelitian

Peneliti berupaya melakukan tiga hal melalui penelitian ini. *Pertama*, mendeskripsikan peran *Non-Governmental Organization (NGO)*, yang dalam hal ini adalah *Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV)*. *Kedua*, memaparkan *Sustainable Sanitation and Hygiene for all (SSH4A) in Small Towns Program*. *Ketiga*, menganalisis peran SNV dalam penerapan *Sustainable Sanitation and Hygiene for all (SSH4A) in Small Towns Programme* di Kabupaten Pringsewu.

Melalui ketiga upaya ini diharapkan akan dihasilkan suatu analisis dan keluaran penelitian yang kemudian dapat berkontribusi pada kajian akademik mengenai peran NGO yang berfokus pada penanganan isu lingkungan hidup. Lebih dari itu, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada kajian khusus terkait peran SNV dalam penerapan *Sustainable Sanitation and Hygiene for all (SSH4A) in Small Towns Programme*.

1.4. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan berkontribusi pada pengembangan konsep-konsep yang berkaitan dengan lingkungan dan pembangunan di dalam konteks disiplin ilmu Hubungan Internasional. Lebih spesifik, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan konsep terkait sanitasi, lingkungan, dan pembangunan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang peran SNV dalam penerapan *Sustainable Sanitation and Hygiene for all (SSH4A) in Small Towns Programme*.

Peneliti juga berharap dapat melengkapi penelitian-penelitian terdahulu terkait peran NGO dalam menghadapi isu lingkungan. Ia diharapkan pula dapat memberikan kesempatan yang luas terhadap penelitian yang lebih mendalam di masa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang menjelaskan tentang peran NGO (*Non-Governmental Organization*), khususnya yang berkaitan dengan persoalan lingkungan hidup, sudah banyak dilakukan. Penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu berada pada tema yang sama, yaitu mengenai peran NGO dalam menerapkan program yang sejalan dengan tujuan bersama. Pada bagian ini, peneliti berupaya mereviu lima sumber.

Pertama, penelitian yang telah dilakukan oleh Nike Qisthiarni, seorang mahasiswa ilmu Hubungan Internasional pada Universitas Indonesia, terkait dengan peranan NGO dalam isu lingkungan yang berjudul *NGOs and Sustainable Development: The Role of Wetlands International-Indonesia Programme in Rehabilitating Coastal Ecosystem and Livelihoods in Aceh-Nias in 2005-2009*. Penelitian ini menggambarkan implementasi program rehabilitasi dan konservasi daerah pesisir di kawasan Aceh-Nias yang dilakukan oleh NGO. Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa untuk merehabilitasi daerah ekosistem pesisir di Aceh-Nias memerlukan berbagai langkah yang bertahap.

Langkah-langkah tersebut terdiri atas kajian terhadap kerusakan ekosistem daerah pesisir di Aceh-Nias pasca tsunami yang melibatkan para ahli di bidangnya. Selanjutnya, dilakukan rehabilitasi ekosistem pesisir dan pengembangan mata pencaharian masyarakat sekitar, termasuk mata pencaharian alternatif. Qisthiarni mengemukakan bahwa NGO juga berupaya untuk mengajak masyarakat sekitar untuk berpartisipasi dalam upaya rehabilitasi ekosistem pesisir, memberikan pendidikan publik untuk menumbuhkan kesadaran pada masyarakat atas pentingnya ekosistem pesisir serta advokasi kebijakan (Qisthiarini, Skripsi, 2012: 61-75).

Kedua, penelitian yang berjudul *Aksiologi Ekofeminisme Liberal dalam Reflexive Modernization: Studi Kasus Transnational Environment Activist Organization dan Peran Pro Fauna dalam Mengangkat Diskursus Pelestarian Satwa Liar di Indonesia Periode 1994-2005* yang dilakukan oleh Kinanti Kusumawardani, seorang mahasiswi pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia. Kusumawardani membahas mengenai peran masyarakat transnasional dan NGO dalam isu lingkungan. Ia menitikberatkan penjelasannya pada masyarakat transnasional dan NGO sebagai aktor politik; tidak hanya terbatas pada pengaruhnya terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga mencakup ruang yang lebih luas, yaitu keterlibatan masyarakat sipil dalam proses perubahan nilai-nilai normatif serta peningkatan kesadaran masyarakat melalui kegiatan sosial-budaya. Berdasarkan studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini diketahui bahwa ekofeminisme liberal merupakan penyebab kausal dari perubahan nilai-nilai

normatif dan hal tersebut secara pasti berperan dalam proses perubahan pada perpolitikan masyarakat sipil dunia (Kusumawardhani, Skripsi, 2008: 72-95).

Ketiga, ada pula penelitian dengan judul *The Role of NGOs in Promoting Empowerment for Sustainable Community Development* yang ditulis oleh Hedayat Allah Nikkhah dan A'rof bin Redzuan, dua orang mahasiswa Ilmu Sosial dan Pembangunan pada Universitas Putra Malaysia. Penelitian mereka juga memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu terkait peranan NGO dalam menangani suatu permasalahan. Namun, penelitian ini memiliki sedikit perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang menitik-beratkan pada persoalan lingkungan. Menyajikan hubungan antara peranan NGO dengan pembangunan komunitas berkelanjutan, para peneliti mengidentifikasi peran NGO yang terdiri dari tiga peran, yaitu *microfinance*, *capacity building*, dan *self-reliance* (Nikkah & Redzuan, Jurnal, Vol. 30, No. 2, 2010: 87-90). Ketiga peran ini akan mendorong sektor ekonomi, individu, dan sosial yang akan menciptakan *sustainable community development*. Hal itu ditujukan agar adanya keseimbangan antara kegiatan manusia dan upaya pelestarian alam, sehingga akan tetap terjaga bagi generasi selanjutnya.

Keempat, *Upaya The Nature Conservancy dalam Konservasi Terumbu Karang dan Lingkungan Pesisir di Kawasan Perairan Nusa Penida Bali* yang dilakukan oleh Santhi Pradayini, I Made Anom Wiranata, dan Putu Titah Kawitri; mereka adalah tim aktivis lingkungan dari Universitas Udayana, Bali, yang meneliti tentang peranan NGO dalam mengatasi isu lingkungan.

Penelitian tersebut mengkaji peran *The Nature Conservancy* (TNC) dalam mengatasi permasalahan lingkungan, yang terbagi ke dalam tiga proses, yakni: (1) proses pendekatan ditujukan oleh TNC kepada tokoh desa, aparaturnya, pemerintah daerah yang bertujuan untuk menyamakan nilai mengenai konservasi lingkungan; (2) pendidikan publik; TNC melakukan intervensi pembangunan dengan memberikan pendidikan publik yang bertujuan untuk mengubah perspektif masyarakat serta untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan; dan (3) advokasi kebijakan, yang ditujukan untuk memastikan terjaminnya pelestarian terumbu karang di Nusa Penida. Di dalam penelitian ini ditemukan bahwa strategi yang digunakan TNC untuk menjalankan program adalah dengan pendekatan pada dua arah, yaitu pendekatan kepada pemerintah daerah dan stakeholders di Nusa Penida (Prayadini, Wiranata, & Kawitri, Jurnal, Vol. 1., No.3, 2015: 1-14).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Andre Agustio, seorang mahasiswa pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Andalas, Padang, yang berjudul *Peran SurfAid Internasional dalam Penanggulangan Masalah Kesehatan di Mentawai*. Dalam penelitian ini, Agustio memfokuskan perhatiannya pada masalah lingkungan dan kesehatan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah terdapat konsistensi SurfAid Internasional dalam berkontribusi untuk menanggulangi isu kesehatan di Mentawai (Andre, Skripsi, 2015: 50-65). Namun, penelitian ini lebih mengkaji perkembangan peranan Surfaid Internasional, yang pada mulanya adalah NGO generasi pertama menjadi NGO generasi ketiga. Perkembangan

yang terjadi ini merupakan konsekuensi dari perluasan isu, strategi, dan aktivitas yang ditangani oleh SurfAid Internasional.

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu yang telah disajikan di atas, dapat diketahui bahwa pada umumnya penelitian-penelitian sebelumnya memfokuskan peranan NGO dalam mengatasi permasalahan lingkungan, seperti mengenai terumbu karang, konservasi dan pembangunan berkelanjutan yang berbasiskan nilai-nilai lingkungan. Namun, ada satu literatur yang membahas mengenai peran NGO dalam mengatasi isu penanggulangan masalah kesehatan dan lingkungan, yang lebih menekankan perhatiannya pada proses perkembangan NGO dari generasi kesatu hingga generasi ketiga. Kelima literatur revidi di atas, juga terdapat beberapa kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti di dalam skripsi ini; tetapi tentu terdapat beberapa perbedaan.

Penelitian yang akan dilakukan lewat skripsi ini akan lebih spesifik, yaitu membahas mengenai hubungan antara lingkungan, kesehatan, dan pembangunan berkelanjutan, khususnya mengenai peran *Stichting Nederlandse Vrijwilliger* (SNV) dalam penerapan *Sustainable Sanitation and Hygiene for all (SSH4A) in Small Towns Programme*, khususnya di Kabupaten Pringsewu, yang sejauh ini belum pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. *Role Theory*

Tokoh politik dunia, Anthony Rosenberg dan T. Coser (1976: 232) dalam bukunya yang berjudul "*An Introduction to International Politics*" mendefinisikan peran sebagai, "*demand that given structuraly (norms, expectations, prohibitions, repsonsibilities) in which there are a series of pressures and ease of connecting, guiding and supporting functions in the organizations*". Dalam konteks ini, peranan diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural berlandaskan norma, harapan, larangan dan tanggung jawab yang di dalamnya terdiri atas serangkaian tekanan dan kemudahan yang mendukung fungsinya dalam suatu organisasi.

Selain itu, Ahli Hubungan Internasional dari Universitas Gadjah Mada, Mochtar Mas' oed dalam bukunya yang berjudul "*Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teoritisasi*", menggambarkan peranan sebagai berikut.

"Peran (*role*) adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Hal ini merupakan suatu perilaku yang dilekatkan pada suatu posisi. Setiap orang yang menduduki posisi itu diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi itu" (Mas' oed, 1989: 44).

Teori peran berasumsi bahwa sebagai besar perilaku adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang oleh

seorang aktor. Teori peran memiliki dua kemampuan yang dapat digunakan dalam menganalisis.

Pertama, teori ini menunjukkan bahwa aktor politik pada umumnya berusaha menyesuaikan perilakunya dengan norma perilaku yang berlaku dalam peran yang dijalankannya. Kerangka berpikir teori peran dalam hal ini memandang individu sebagai seseorang yang bergantung pada dan bereaksi terhadap perilaku orang lain (Mas' oed, 1989: 45). *Kedua*, teori peran memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan institusi secara behavioral. Dalam pandangan ini, institusi merupakan serangkaian pola perilaku yang berkaitan dengan peranan. Model teori peran menunjukkan segi-segi perilaku yang membuat suatu kegiatan sebagai institusi (Mas' oed, 1989: 45). Dengan kata lain, institusi bisa didefinisikan sebagai serangkaian peran yang saling berkaitan dan berfungsi mengorganisasikan dan mengkoordinasikan perilaku demi mencapai suatu tujuan.

Teori peran yang dikemukakan oleh Mas' oed (1989: 42) terfokus pada peran dalam tingkatan kelompok yang memusatkan analisis terhadap kelompok yang terlibat dalam kekuatan sebenarnya dibalik kehidupan politik dan hubungan internasional. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Mas' oed, William W. Biddle dan Loureide J. Biddle dalam bukunya yang berjudul "*Community Developmet*", merumuskan bahwa peran suatu kelompok sebagai institusi atau lembaga dapat dibagi menjadi dua, yaitu diantaranya:

1. *the role as a motivator, it means to act to provide encouragement others to do something to achieve goals; and*
2. *the role of communicator, meaning that convey all the information that correct and accountable (Biddle & Biddle, 1965: 215-217).*

2.3. Landasan Konseptual

2.3.1. Peran *Non-Governmental Organizations* (NGO)

Non-Governmental Organizations (NGO) merupakan lembaga non-profit, kelompok warga sukarela, baik yang diselenggarakan pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Dalam kaitan ini, Heins, seorang tokoh politik lingkungan dunia, mengemukakan defenisi tentang NGO sebagai berikut:

“NGOs are voluntary associations that neither struggle for a share of governmental power nor have a mandate from the government or the state for their existence and activities. They stand up and speak out not for themselves, but for others who are symbolically represented as innocent, oppressed, deprived, neglected, underrepresented, dispossessed, disdained, excluded, disenfranchised, and forgotten. The activity on behalf of others is closely intertwined with systematically cultivating alliances across international borders and is, at least to a large extent, inspired by universalistic ideals” (Heins, 2008: 19).

Dua tokoh ekonom lingkungan dunia lainnya, yaitu Yaziji dan Doh (2009: 3-5), mengatakan bahwa NGO berorientasi pada tugas dan didorong oleh orang-orang dengan kepentingan bersama, melakukan pelayanan dan fungsi kemanusiaan, menyampaikan aspirasi

masyarakat, serta memantau kebijakan. Terdapat karakteristik mendasar dari NGO, yaitu independen dari kontrol langsung negara. Terkait dengan fungsi NGO, Welch (1995: 10-13), seorang peneliti yang berfokus pada dampak NGO, menyatakan bahwa NGO berfungsi sebagai penghubung antara ranah pemerintahan yang kompleks dan asing dengan ranah kelompok sosial dan ekonomi yang dekat dengan dan dikenal oleh masyarakat.

NGO terus mengalami evolusi, yang dapat dibagi menjadi tiga periode waktu yang dapat diistilahkan dengan “tiga generasi” (Korten, *World Development Journal*, Vol. 15, 1987: 147-149). Perkembangan ini terkait erat dengan strategi program pembangunan NGO. NGO generasi pertama cenderung memberikan perhatian utama terhadap isu kemanusiaan dan kesejahteraan, sedangkan NGO generasi kedua dan ketiga lebih mengutamakan persoalan terkait pembangunan, ketiga generasi tersebut hanya berbeda dalam aspek ruang lingkup.

Tabel 1.1. berikut menjelaskan tiga generasi strategi program pembangunan NGO menurut David C. Korten, seorang analis sistem kelembagaan dan aktivis lingkungan dunia.

Tabel 1.1. Tiga Generasi Strategi Program Pembangunan NGO

	<i>First Generation</i>	<i>Second Generation</i>	<i>Third Generation</i>
<i>Defining features</i>	<i>Relief and welfare</i>	<i>Small-scale self reliant local development</i>	<i>Sustainable system development</i>
<i>Problem definition</i>	<i>Shortage of goods and services</i>	<i>Local inertia</i>	<i>Institutional and policy constraints</i>
<i>Time frame</i>	<i>Immediate</i>	<i>Project life</i>	<i>Indefinite long-term</i>
<i>Spatial scope</i>	<i>Individual or family</i>	<i>Neighborhood or village</i>	<i>Region or nation</i>
<i>Chief actors</i>	<i>NGO</i>	<i>NGO +beneficiary organizations</i>	<i>All public and private institutions that define the relevant system</i>
<i>Development education</i>	<i>Straving children</i>	<i>Community self-help initiatives</i>	<i>Failure in interdependent systems</i>
<i>Management orientation</i>	<i>Logistics management</i>	<i>Project management</i>	<i>Strategic management</i>

Sumber: Korten, D.C. (1987). 'Third Generation NGO Strategies: A Key to People-centered Development' in *World Development*, vol. 15. p. 148.

NGO pada generasi pertama yang muncul karena Perang Dunia pertama memiliki perhatian utama dalam isu kemanusiaan dan kesejahteraan. Hal ini berdampak pada program yang dijalankan, yaitu terfokus pada pemenuhan kebutuhan yang mendesak pada situasi darurat, seperti bencana alam dan krisis, yang semuanya didanai oleh sektor privat/swasta. Dalam konteks ini, terlihat bahwa, pada saat itu, fokus utama adalah individu atau keluarga. Korten menyebutkan bahwa NGO generasi pertama memiliki kekurangan bila dilihat dengan teori pembangunan yang mengedepankan

keberlanjutan serta strategi jangka panjang (Korten, *World Development Journal*, Vol. 15, 1987: 147). Hal ini karena upaya yang dilakukan NGO generasi pertama hanya untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak; pendekatan ini justru tidak merumuskan dampak jangka panjang kemiskinan dan pembangunan.

Menyadari kekurangan dari generasi pertama, NGO generasi kedua lebih memfokuskan perhatiannya pada proyek pembangunan masyarakat. Hal ini berbeda dari sebelumnya di mana perhatian lebih difokuskan kepada peningkatan kapasitas. Beragam upaya yang dilakukan justru ditekankan pada pembangunan kelompok mandiri pada tingkat lokal atau desa. NGO generasi kedua seringkali menjalankan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah. Inisiatif pembangunan berasal dari NGO dan masyarakat. Korten menyebutkan bahwa strategi generasi kedua memiliki perbedaan; mereka lebih memusatkan perhatian pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) atau *empowerment* sebagai isu utama (Korten, *World Development Journal*, Vol. 15, 1987: 148).

Beberapa dekade kemudian, munculah NGO generasi ketiga yang menyadari bahwa upaya yang dilakukan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang masih terbatas. NGO generasi ketiga lebih memiliki peran *foundation-like* daripada pelayanan operasional (Korten, *World Development Journal*, Vol. 15, 1987: 149). NGO generasi ketiga ini meliputi mobilisasi *grassroots* dan advokasi kebijakan.

Berdasarkan paparan di atas, dapat diketahui bahwa NGO telah berperan di dunia sejak Perang Dunia pertama. Hal ini menggambarkan bahwa keterlibatan NGO sudah lama dan telah diakui secara luas oleh dunia. Dewasa ini, NGO tidak hanya memfokuskan pandangannya pada aspek-aspek sebagaimana disebutkan di atas, namun juga memberikan penekanan pada aspek lingkungan yang dapat memengaruhi aspek-aspek lainnya. NGO telah mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan isu-isu lingkungan. Langkah-langkah tersebut meliputi advokasi, pelatihan, penelitian, publikasi dan kerja sama dengan para pembuat kebijakan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat miskin dan lingkungan dalam satu kesatuan.

Environmental Non-Governmental Organization (ENGO) ialah NGO yang kegiatannya berfokus pada isu-isu lingkungan. Jumlah ENGO terus mengalami perkembangan, terutama di negara-negara berkembang (Samuel & Thanikachalam, 2003: 427-440). *Stichting Nederlandse Vrijwilligers* (SNV) sendiri termasuk dalam NGO yang bergerak dalam bidang lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, khususnya di negara-negara berkembang. Terkait dengan peran NGO, *the United Nations Environmental Programme* (UNEP-International Environment Technology Centre, 2003: 1-8), menyebutkan bahwa terdapat enam peranan NGO, yaitu:

2.3.1.1. *Development and Operation of Infrastructure*

Dalam hal ini, NGO berperan sebagai organisasi yang berbasis masyarakat; NGO bekerja sama dalam mengembangkan dan membangun perumahan, menyediakan, dan memelihara infrastruktur. Di samping itu, NGO juga dapat mengembangkan usaha yang berbasis pada perekonomian masyarakat. Untuk menjalankan peran ini, pada umumnya dibutuhkan kerja sama dalam bentuk bantuan teknis dari lembaga pemerintah atau NGO yang tingkatannya lebih tinggi.

2.3.1.2. *Supporting Innovation, Demonstration, and Pilot Projects*

NGO memiliki beberapa keuntungan, di antaranya ialah keuntungan dari segi memilih lokasi tertentu untuk melaksanakan proyek-proyek yang inovatif dan juga menentukan jangka waktu yang diperlukan untuk melaksanakan proyek, serta dapat mengatasi beberapa kekurangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam suatu proyek tertentu. Selain itu, NGO juga dapat menjadi pilot untuk proyek-proyek yang sejalan dengan proyek yang dijalankan oleh pemerintah. Hal itu karena NGO mempunyai kemampuan yang lebih besar dan cepat daripada birokrasi pemerintah.

2.3.1.3. *Facilitating Communication*

Dalam peran yang ketiga, NGO menggunakan metode komunikasi interpersonal untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. NGO berperan sebagai fasilitator yang dapat memfasilitasi komunikasi dari masyarakat ke pemerintah – dan sebaliknya, yaitu dari pemerintah ke masyarakat. Komunikasi yang dijalin ke pemerintah terkait dengan menginformasikan beragam hal yang disampaikan oleh masyarakat. Sementara, komunikasi dari pemerintah ke masyarakat ialah terkait dengan rencana yang akan dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Selain peran tersebut, NGO juga memiliki peran lainnya, yakni penyebaran informasi secara horizontal dengan jaringan antara organisasi yang memiliki bidang dan tujuan yang sama.

2.3.1.4. *Technical Assistance and Training*

Selain ketiga peran tersebut, NGO juga berperan sebagai lembaga pelatihan yang dapat mengembangkan bantuan dan pelatihan teknis dan pelatihan kapasitas yang ditujukan untuk membantu masyarakat dan pemerintah.

2.3.1.5. *Research Monitoring and Evaluation*

NGO berperan dalam mendokumentasikan kegiatan dan melakukan monitoring serta evaluasi secara partisipatif dengan berbagi hasil dengan masyarakat dan para pelaksana lapangan dalam menjalankan program tertentu.

2.3.1.6. *Advocacy for and with the poors*

Pada umumnya, NGO berperan sebagai juru bicara bagi masyarakat miskin dan berupaya untuk memengaruhi kebijakan dan program pemerintah. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya ialah dengan berpartisipasi dalam jajak pendapat dan forum publik serta perumusan kebijakan pemerintah. Hal-hal yang telah dianalisis oleh NGO terkait masyarakat marginal dipublikasikan, sebagaimana peran NGO yang kelima di atas. Dapat disimpulkan bahwa NGO memainkan peran sebagai pendukung, agitator, dan mediator masyarakat dalam pelaksanaan suatu program.

Selain keenam peran tersebut, dalam era otonomi daerah seperti saat ini, NGO juga memiliki peran besar dalam dua kategori berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerja sama Departemen Dalam Negeri dengan Lembaga Asing Non Pemerintah, yaitu:

1. Pemberdayaan, yang dilakukan melalui pengorganisasian dan pendampingan dalam melaksanakan suatu program, baik program atau kebijakan yang berasal dari pemerintah maupun yang bukan, tetapi masih sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai.
2. Advokasi, yang dilakukan adalah penyadaran akan hak dan kontrol atas kebijakan pemerintah yang akan berdampak bagi masyarakat.

Wills, seorang peneliti di bidang politik, pembangunan, dan lingkungan negara-negara berkembang, mengatakan bahwa peran-peran yang dilakukan NGO, khususnya dalam bidang lingkungan dan pembangunan di masyarakat, mengacu pada:

- a. kesejahteraan masyarakat dan penyediaan pelayanan;
- b. bantuan darurat;
- c. pengembangan pendidikan;
- d. partisipasi dan pemberdayaan;
- e. swasembada;
- f. advokasi; dan
- g. jaringan (Wills, 2005: 25).

2.3.2. *Sustainable Development*

Dalam *Our Common Future* yang dipublikasikan oleh *the World Commission on Environment and Development* (WCED) pada tahun 1987, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai “*development that meet the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own*

needs” (WCED, 1987: 43). Definisi ini bermakna bahwa dalam pembangunan, bukan hanya kebutuhan generasi saat ini yang harus dipenuhi, tetapi generasi mendatang juga harus dipertimbangkan pemenuhannya. Terdapat tiga komponen utama yang harus diselaraskan guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, terdapat pula lima prinsip utama yang terkandung dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, yaitu:

2.3.2.1. *Intergenerational Equity*

Setiap generasi pada dasarnya memiliki hak untuk menerima dan menempati bumi dalam kondisi yang baik; namun, akibat dari perbuatan generasi sebelumnya, kondisi bumi menjadi buruk, yang pada akhirnya akan sangat merugikan generasi mendatang (Weiss, *American Journal of International Law*, Vol. 84, 1991: 201-202). Hal itu terjadi karena beberapa hal. *Pertama*, konsumsi yang berlebihan terhadap sumber daya berkualitas yang membuat generasi mendatang harus membayar lebih mahal untuk dapat menikmati sumber daya berkualitas. *Kedua*, pemakaian sumber daya yang kurang efisien yang akhirnya menyebabkan generasi mendatang harus membayar mahal atas ketidak-efisienan oleh generasi sekarang.

2.3.2.2. *Intragenerational Equity*

Prinsip ini berkaitan dengan isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, yang dikarenakan: (1) beban dan permasalahan dipikul oleh masyarakat yang lemah secara sosial dan ekonomi (Santosa, Jurnal Hukum Lingkungan Tahun III, 1991: 1-21); (2) kemiskinan menyebabkan degradasi lingkungan mengingat masyarakat yang masih berorientasi pada taraf pemenuhan *basic needs* pada umumnya tidak memiliki kepedulian lingkungan; (3) upaya-upaya perlindungan dapat berakibat pada sektor-sektor lain; dan (4) ketidak-merataan anggota masyarakat dalam memiliki akses terkait proses pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan pengetahuan, keterampilan, keberdayaan serta struktur pengambilan keputusan yang dapat menguntungkan anggota atau kelompok masyarakat tertentu.

2.3.2.3. *Precautionary Principle*

Prinsip ini menyatakan bahwa tidak adanya pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasti; tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda-nunda upaya pencegahan kerusakan lingkungan.

2.3.2.4. *Conservation of Biological Diversity*

Prinsip ini merupakan prasyarat bagi berhasilnya pelaksanaan prinsip keadilan antar-generasi. Potensi keragaman hayati memberikan arti penting bagi kesinambungan kehidupan umat manusia. Semakin besar kerusakan, ia akan berdampak signifikan bagi keberlangsungan kehidupan umat manusia.

2.3.2.5. *Internalisation of Environmental Cost and Incentive Mechanism*

Prinsip ini dilatar-belakangi oleh suatu keadaan di mana penggunaan sumber daya alam saat ini merupakan dorongan dari pasar. Kerusakan lingkungan dapat dilihat sebagai *external cost* dari suatu kegiatan ekonomi yang dialami oleh pihak yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut. Oleh karena itu, biaya tersebut harus dimasukkan dalam proses pengambil keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber-sumber daya alam tersebut.

2.3.3. **Jejaring**

Sikkink dan Keck (1998: 129-145), dua tokoh/pemikir politik lingkungan, mengatakan bahwa *transnational advocacy network* merupakan komunikasi di mana anggota-anggota termotivasi oleh *shared principled ideas/values*. Aktor-aktor dalam jejaring advokasi internasional ialah (1) NGO internasional dan lokal, organisasi

advokasi, dan penelitian; (2) *foundations*; (3) gerakan sosial lokal; (4) media; (5) intelektual; (6) bagian organisasi *intergovernmental* regional dan internasional; serta (7) bagian dari eksekutif dan atau parlementer. Meskipun tidak semua aktor dapat ditemui dalam jejaring advokasi, namun NGO memiliki peran sentral dalam mayoritas jejaring advokasi.

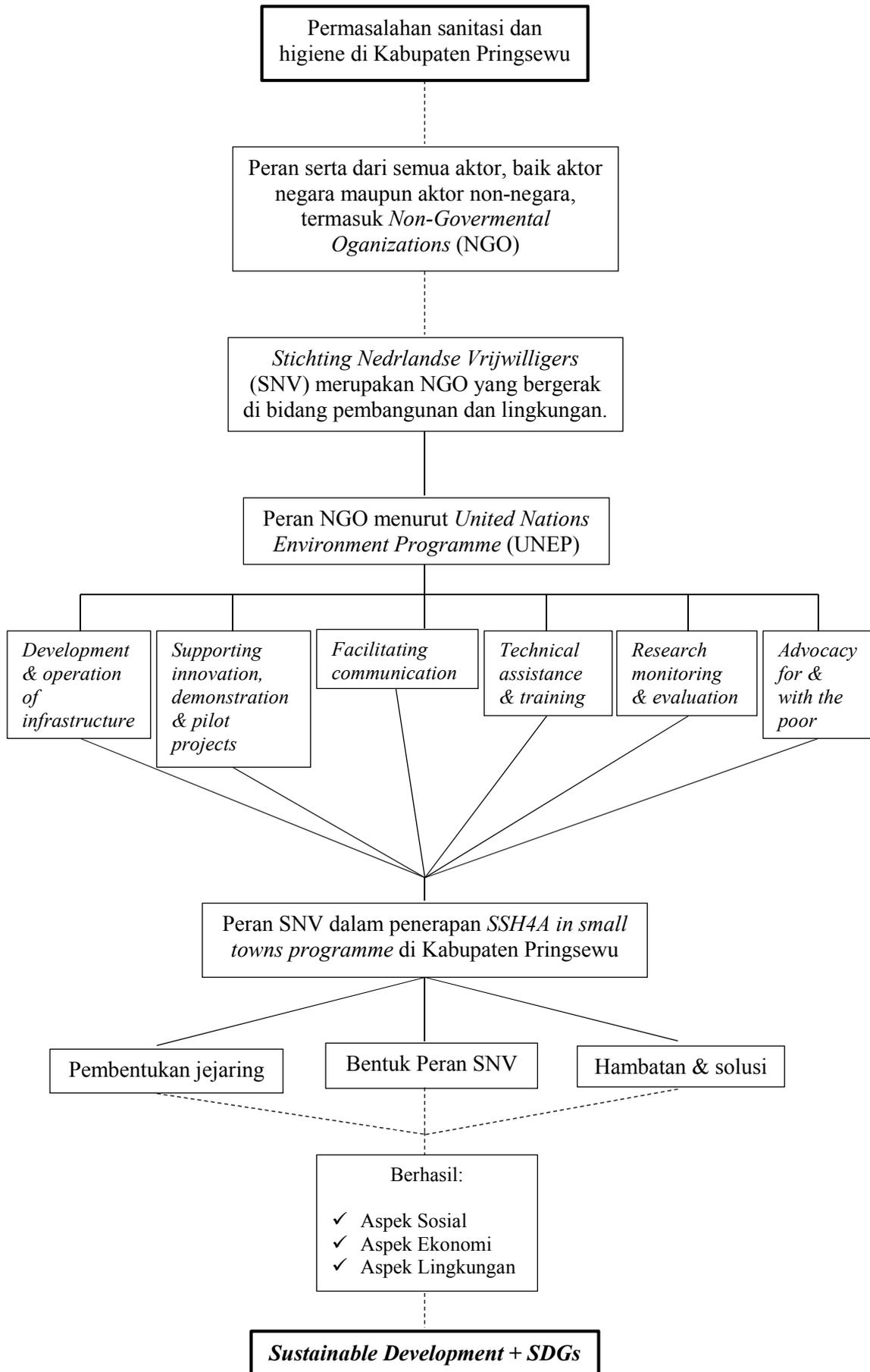
Terdapat tiga tipologi taktik yang digunakan dalam jejaring, di antaranya ialah (1) *informations politics*, yaitu kemampuan untuk memindahkan informasi yang berguna dengan cepat dan kredibel ke tempat yang memberikan dampak yang besar; (2) *leverage politics*, yakni kemampuan untuk menggunakan aktor yang kuat untuk memengaruhi situasi di mana anggota terlemah dari jejaring tidak mungkin memiliki pengaruh; dan (3) *accountability politics* atau usaha untuk mengharuskan aktor yang kuat untuk bertindak sesuai dengan prinsip yang sudah disahkan secara formal.

2.4. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pikir ini, peneliti mencoba menjelaskan permasalahan utama dari penelitian yang akan dilakukan, yaitu menganalisis peran *Stichting Nederlandse Vrijwilligers* (SNV) dalam penerapan *Sustainable Sanitation and Hygiene for all (SSH4A) in Small Towns Programme* di Kabupaten Pringsewu. Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini digabungkan dengan konsep yang akan disusun dalam kerangka pikir.

Untuk menyelesaikan permasalahan sanitasi dan higiene yang buruk di Indonesia, terutama di daerah pedesaan seperti di Kabupaten Pringsewu sekaligus untuk mencapai tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) terkait sanitasi untuk semua, maka diperlukan keterlibatan dari berbagai pihak. Dalam hal ini, pemerintah belum mampu menyelesaikan permasalahan ini: sehingga, dibutuhkan peran serta dari lembaga non-pemerintah, seperti SNV. NGO memiliki setidaknya enam peran, sebagaimana yang dirumuskan oleh UNEP, yaitu di antaranya adalah *development and operation of infrastructure; supporting innovation, demonstration and pilot projects; facilitating communication; technical assistance and training; research monitoring and evaluation; dan advocacy for ad with the poor.*

Teori mengenai peranan NGO tersebut dapat membantu untuk menjelaskan peranan SNV dalam penerapan program SSH4A di Kabupaten Pringsewu yang dilihat dari bentuk penerapan keenam peran menurut UNEP oleh SNV dalam program tersebut. Selain itu, akan dilihat pula peran SNV dalam menciptakan jejaring yang akan turut berperan serta dalam upaya penerapan program SSH4A. Dengan demikian, akan terlihat hambatan-hambatan dan solusi penyelesaian dalam penerapan program tersebut. Sehingga, tujuan dari *sustainable development* akan tercapai atau berhasil pada tiga aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan adanya peran SNV, maka tujuan dari SDGs akan tercapai.



Gambar 1.1. Bagan Kerangka Pemikiran

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

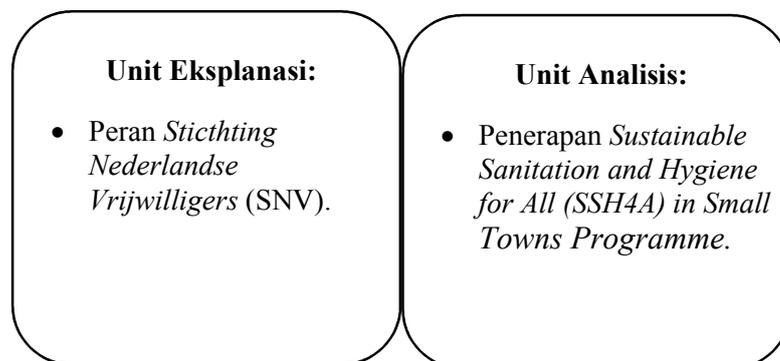
Untuk mengkaji pembahasan ini, peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif. Kemudian, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Kirk dan Miller, dua peneliti kualitatif dari Universitas Sage (seperti dikutip dari Sudarto, 1995: 62), mengatakan bahwa pada umumnya, metode ini digunakan dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah (naturalistik), di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2014: 7-8).

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Studi kasus merupakan metode dengan riset yang menggunakan dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok, program, organisasi atau peristiwa secara sistematis (Yin, 2009: 7). Peneliti dapat mengamati fenomena dalam penerapan *Sustainable Sanitation and Hygiene for All (SSH4A) in Small Towns Programme* di Kabupaten Pringsewu oleh SNV.

Sehingga peneliti dapat menyimpulkan fenomena yang telah terjadi dalam proses penerapan program SSH4A.

3.2. Tingkat Analisis

Level (atau tingkat) analisis merupakan satuan atau fenomena yang akan diteliti dan dijelaskan dalam suatu penelitian (Mas'ood, 1990: 39). Dalam proses pemilihan level analisis pada penelitian ini, peneliti akan menetapkan **unit analisis** dan **unit eksplanasi**. Unit analisis merupakan perilaku yang hendak dideskripsikan, dijelaskan, dan diramalkan (Mas'ood, 1990: 39). Unit analisis dalam penelitian ini adalah **penerapan *Sustainable Sanitation and Hygiene for All (SSH4A) in Small Towns Programme***. Sedangkan, unit eksplanasi yaitu yang dampaknya terhadap unit analisis yang hendak diamati (Mas'ood, 1990: 39). Dalam penelitian ini, unit eksplanasinya ialah **peran *Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV)***. Gambar 1.2. berikut ini menjelaskan level analisis yang dimaksud.



Gambar 1.2. Level Analisis

3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pemusatan fokus kepada intisari penelitian yang akan dilakukan. Fokus penelitian merupakan garis terbesar dalam penelitian yang akan menjadikan penelitian lebih terarah. Moleong, seorang peneliti kualitatif (dikutip Sudarto, 1995: 63-64), menyatakan bahwa fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi penelitian kualitatif bagi peneliti. Hal itu ditujukan agar peneliti tidak terjebak dalam beragam data yang telah dihimpun. Fokus penelitian ini akan membantu peneliti memilih data-data yang relevan dengan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

Fokus penelitian ini adalah peran *Stichting Nederlandse Vrijwilligers* (SNV) dalam penerapan *Sustainable Sanitation and Hygiene for all (SSH4A) in Small Towns Programme* di Kabupaten Pringsewu. Untuk mengetahui peran tersebut, peneliti menggunakan teori peran dengan menggunakan konsep peran NGO yang dapat diukur melalui indikator-indikator di bawah ini, guna melihat SNV dalam menerapkan indikator-indikator tersebut dalam *Sustainable Sanitation and Hygiene for all (SSH4A) in Small Towns Programme* di Kabupaten Pringsewu.

1. *Development and operation infrastructure*, yang dapat dilihat dari peran SNV dalam mengembangkan dan membangun perumahan, menyediakan dan memelihara infrastruktur, mengembangkan usaha yang berbasis pada perekonomian masyarakat, serta bantuan-bantuan teknis.
2. *Supporting innovation, demonstration and pilot projects*, yang dapat dilihat dari peran SNV dalam melaksanakan proyek-proyek yang inovatif.

3. *Facilitating communication*, yang dapat dilihat dari peran SNV menjadi fasilitator yang dapat memfasilitasi komunikasi dari masyarakat ke pemerintah dan sebaliknya, yaitu dari pemerintah ke masyarakat, serta menyebarkan informasi secara horizontal.
4. *Technical assistance and training*, yang dapat dilihat dari peran SNV dalam memberikan pelatihan, bantuan dan pelatihan teknis serta pelatihan kapasitas.
5. *Research monitoring and evaluating*, yang dapat dilihat dari peran SNV dalam mendokumentasikan kegiatan, melakukan monitoring serta evaluasi secara partisipasif terhadap masyarakat.
6. *Advocacy for and with the poor*, yang dapat dilihat dari peran SNV sebagai juru bicara bagi masyarakat miskin, partisipasi dalam jajak pendapat dan forum publik serta perumusan kebijakan pemerintah daerah.

Keenam indikator di atas akan menjawab peran SNV dalam menerapkan SSH4A *in Small Towns Programme* di Kabupaten Pringsewu. Keberhasilan peran SNV dalam menerapkan program tersebut akan diukur melalui pemenuhan prinsip-prinsip *sustainable development* di bawah ini.

1. *Intergenerational equity*: mendapatkan hak yang sama untuk menerima dan menempati bumi dalam kondisi yang baik.
2. *Intragenerational equity*: penyelesaian masalah yang berkaitan dengan isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
3. *Precautionary principle*: upaya pencegahan kerusakan lingkungan.
4. *Conservation of biological diversity*: konservasi.

5. *Internalisation of environmental and incentive mechanism*: kerusakan lingkungan harus dimasukkan dalam proses pengambilan keputusan.

Keberhasilan SNV tidak hanya diukur melalui pemenuhan prinsip-prinsip *sustainable development* semata, namun dapat diukur melalui pencapaian target dari *Sustainable Sanitation and Hygiene for All (SSH4A) in Small Towns Programme* di Kabupaten Pringsewu.

3.4. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di dua lokasi, yaitu di wilayah Kabupaten Pringsewu dan koordinator kecamatan SNV yang berlokasi di Kecamatan Pagelaran. Lokasi ini dipilih berdasarkan:

1. Kabupaten Pringsewu merupakan daerah atau tempat diterapkannya *Sustainable Sanitation and Hygiene for All (SSH4A) in Small Towns Programme* oleh SNV.
2. Koordinator Kecamatan SNV merupakan perwakilan SNV di Kabupaten Pringsewu yang menjadi pusat pertemuan para mitra kerja sama dalam menerapkan *Sustainable Sanitation and Hygiene for All (SSH4A) in Small Towns Programme*.

3.5. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan penelitian, berupa uraian lisan atau tertulis yang ditujukan oleh informan

(Sugiyono, 2014: 217). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil uraian melalui wawancara kepada *team leader*, yang dalam hal ini adalah *Water, Sanitation, and Hygiene (WASH) Governance* dan *Sanitation Supply Chains and Finance* di SNV, Paguyuban Penggiat dan Pengusaha Sanitasi, Kepala Pekon/Desa di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, dan masyarakat.

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari informan, melainkan melalui dokumen (Sugiyono, 2014: 138). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data mengenai sanitasi di Kabupaten Pringsewu, yang berasal dari Laporan Progress SNV, Database STBM, Dokumen Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah sekumpulan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitannya (Sugiyono, 2014: 137). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi. Ia merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Susan Stainback (seperti dikutip Sugiyono, 2014: 241), menyatakan bahwa:

“the aim is not to determine the truth about some social phenomenon, rather to purpose of triangulation is to increase one’s understanding of whatever is being investigated”.

Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang fenomena yang diteliti, tetapi lebih kepada peningkatan pemahaman peneliti tentang apa yang telah ditemukan.

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi dan hal-hal dari informan yang lebih mendalam. Wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam atau *in-depth interview* merupakan suatu proses mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab yang dilakukan melalui tatap muka antara peneliti dan informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara (Sugiyono, 2014: 233). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun, dalam hal ini pedoman yang akan digunakan peneliti terdiri dari garis-garis besar permasalahan yang akan diteliti.

Selain wawancara, peneliti juga menggunakan teknik observasi sebagai teknik pengumpulan data. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Peneliti akan melakukan observasi partisipan; peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh objek yang diamati atau objek yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Lewat observasi partisipan, data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan juga akan memungkinkan peneliti untuk mengetahui makna dari setiap perilaku yang nampak (Sugiyono, 2014: 227). Teknik ketiga yang akan digunakan ialah dokumentasi; dokumen dapat berupa tulisan ataupun gambar yang dapat menggambarkan hal-hal yang diteliti (Sugiyono, 2014: 240).

3.7. Teknik Analisis Data

Berdasarkan metode studi kasus yang digunakan, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan mengumpulkan data-data dari lapangan, kemudian menganalisis dengan cara memaparkan hasil penelitian melalui kalimat-kalimat. Dengan demikian peneliti memaparkan secara mendalam hasil penelitian sesuai dengan sebenarnya. Sehingga untuk menganalisis data-data tersebut, maka perlu digunakan teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni teknik analisis data model Miles and Huberman. Tahap-tahap analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

3.7.1. *Data Reduction*

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pertransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan yang tertulis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat ditarik atau digambarkan dan diverifikasi (Sugiyono, 2014: 247-249).

Dalam hal ini, peneliti melakukan pemilihan data yang telah didapat dari lapangan yang dapat diperlukan berdasarkan fokus penelitian dengan batasan data yang ada dalam pedoman wawancara yang telah dibuat. Hal tersebut disesuaikan dan dipilih data yang berguna untuk disajikan dalam penyajian data, terkait peran SNV

dalam menerapkan *Sustainable Sanitation and Hygiene for All (SSH4A) in Small Towns Programme* di Kabupaten Pringsewu.

3.7.2. *Data Display*

Penyajian data ditujukan untuk mempermudah peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Dalam penelitian kualitatif data dapat disajikan dalam bentuk tabel dan bagan. Melalui penyajian data tersebut, data menjadi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah untuk dipahami. Peneliti melakukan pengecekan ulang mengenai data yang telah dipilih pada proses reduksi data. Pengecekan terhadap data dapat digunakan untuk menyajikan suatu kesimpulan.

3.7.3. *Conclusion Drawing/Verification*

Tahap ketiga dalam analisis data kualitatif menurut, Miles dan Huberman, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, data-data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan telaah pustaka yang telah direduksi dan disajikan ditarik kesimpulannya, yang pada akhirnya menjawab pertanyaan dari rumusan masalah (Sugiyono, 2014: 252-253). Dalam penelitian ini, hasil penelitian diuraikan dalam hasil dan pembahasan yakni peran SNV dalam menerapkan *Sustainable Sanitation and Hygiene for All (SSH4A) in Small Towns Programme* di Kabupaten Pringsewu.

IV. GAMBARAN UMUM

Bab ini memaparkan gambaran umum mengenai NGO yang diteliti, yakni *Stichting Nederlandse Vrijwilligers* (SNV) beserta program *Sustainable Sanitation and Hygiene for All (SSH4A) in Small Towns Programme* yang akan diterapkan. Selain itu, peneliti juga memaparkan gambaran tentang daerah/tempat diterapkannya program SSH4A, yakni Kabupaten Pringsewu.

4.1. Gambaran Umum *Stichting Nederlandse Vrijwilligers* (SNV)

Dalam gambaran umum mengenai SNV, peneliti akan memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan perjalanan dan perkembangan SNV, yakni mengenai sejarah singkat, visi dan misi, pendekatan, perwakilannya di negara-negara, dan pendanaannya.

4.1.1. Sejarah Singkat

Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV) merupakan NGO yang bekerja secara global, regional, nasional hingga lokal, guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (SNV, *Annual Report*, 2015: 4). SNV merupakan organisasi pembangunan non-pemerintah yang independen dan tidak berorientasi untuk mencari keuntungan (*not-for-profit*).

SNV didirikan pada tahun 1965 di Belanda, yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Luar Negeri Belanda (SNV, *Annual Report*, 2013: 1). Pada saat itu, SNV difokuskan untuk mengumpulkan para relawan di Belanda untuk memberikan bantuan ke negara-negara selatan. Namun pada tahun 1993, organisasi ini memutuskan untuk memisahkan diri dari Kementerian Luar Negeri karena para relawan merasa bahwa jaringan yang telah dibangun membutuhkan lembaga perwakilan di negara-negara selatan atau disebut dengan *host organizations and countries* (SNV, *Annual Report*, 2013: 2). Hal itu tidak bisa diwujudkan ketika organisasi tersebut berada di bawah Kementerian Luar Negeri Belanda, yang dikarenakan adanya keterbatasan suatu negara dalam memberikan bantuan kepada negara lain dengan membentuk lembaga perwakilannya. Oleh sebab itu, pada akhirnya SNV secara resmi memisahkan diri tahun 2002 dan bertransformasi menjadi sebuah organisasi non-pemerintah yang lebih berfokus terhadap peningkatan kapasitas pembangunan dan mendirikan lembaga perwakilannya di beberapa kawasan, diantaranya Asia, Afrika dan Amerika Latin (SNV, *Annual Report*, 2013: 3-4)

SNV secara resmi beroperasi di Indonesia pada tahun 2013 atas dasar *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Pemerintah Indonesia, yaitu dengan Kementerian Dalam Negeri tentang Program Pembangunan Wilayah Terpadu yang Berkelanjutan, yang ditandatangani pada tanggal 7 Oktober 2013 (Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri

Republik Indonesia, http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index?Treaty=&sort=treaty_title.desc&Treaty_page=395, akses 11 Oktober 2016). SNV bermitra dengan Kementrian Dalam Negeri pada tiga sektor utama di Indonesia, yaitu air dan sanitasi, energi terbarukan dan pertanian, serta isu lintas sektor perubahan iklim. MoU ini berjangka waktu tiga tahun dengan perpanjangan otomatis satu tahun guna memproses evaluasi dan perpanjangan. Selain menjalin kerja sama dengan Kementrian Dalam Negeri, SNV juga bekerja sama dalam kemitraan yang erat dengan lembaga lainnya, diantaranya: (1) Kementerian Nasional, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; (2) masyarakat sipil, organisasi non-profit dan organisasi berbasis masyarakat; dan (3) universitas dan organisasi penelitian (SNV Indonesia, 2013: 16).

4.1.2. Visi dan Misi

Visi SNV adalah untuk membekali masyarakat, kelompok usaha dan lembaga atau organisasi lokal dengan sarana, pengetahuan dan koneksi yang dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan mereka serta mendapatkan akses terhadap pelayanan dasar. Memberdayakan masyarakat agar keluar dari lingkaran kemiskinan dan membantu meningkatkan kesejahteraan hidup mereka (SNV Indonesia, 2013: 2). Visi ini didasari atas filosofi yang dipegang teguh organisasi ini sejak berdiri, yaitu selalu bermitra dan memberdayakan masyarakat setempat (lokal) karena adanya kepercayaan bahwa perubahan yang

berkelanjutan harus dimulai dari orang-orang yang menetap dan bekerja di wilayah tersebut.

Untuk mewujudkan visi tersebut, SNV merumuskan beberapa misi yang akan dilakukan. Adapun misi dari SNV (2013:3) adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kesejahteraan 500.000 penduduk Indonesia.
2. Membantu meningkatkan kinerja dua puluh organisasi lokal, dua puluh penyedia layanan dan lima forum *multi-stakeholder*.
3. Melatih dua ribu staf lokal dan lima puluh ribu penerima manfaat.
4. Membagikan serta menghasilkan pengetahuan dari tingkat lokal hingga internasional melalui dua puluh publikasi internasional serta empat acara internasional.

4.1.3. Pendekatan

Pendekatan SNV adalah berupaya untuk mengembangkan kapasitas lokal, membangun sumber daya dan sumber pengetahuan dari bawah ke atas. SNV berupaya melihat dari sudut pandang yang berbeda, untuk mengubah suatu permasalahan menjadi peluang dan menguji batasan-batasan yang ada. Terdapat empat prinsip utama pendekatan SNV di Indonesia (SNV Indonesia, 2013: 6-7), yaitu sebagai berikut.

1. Pembangunan yang inklusif, yaitu dengan melibatkan masyarakat pra-sejahtera di dalam rantai nilai dunia usaha.

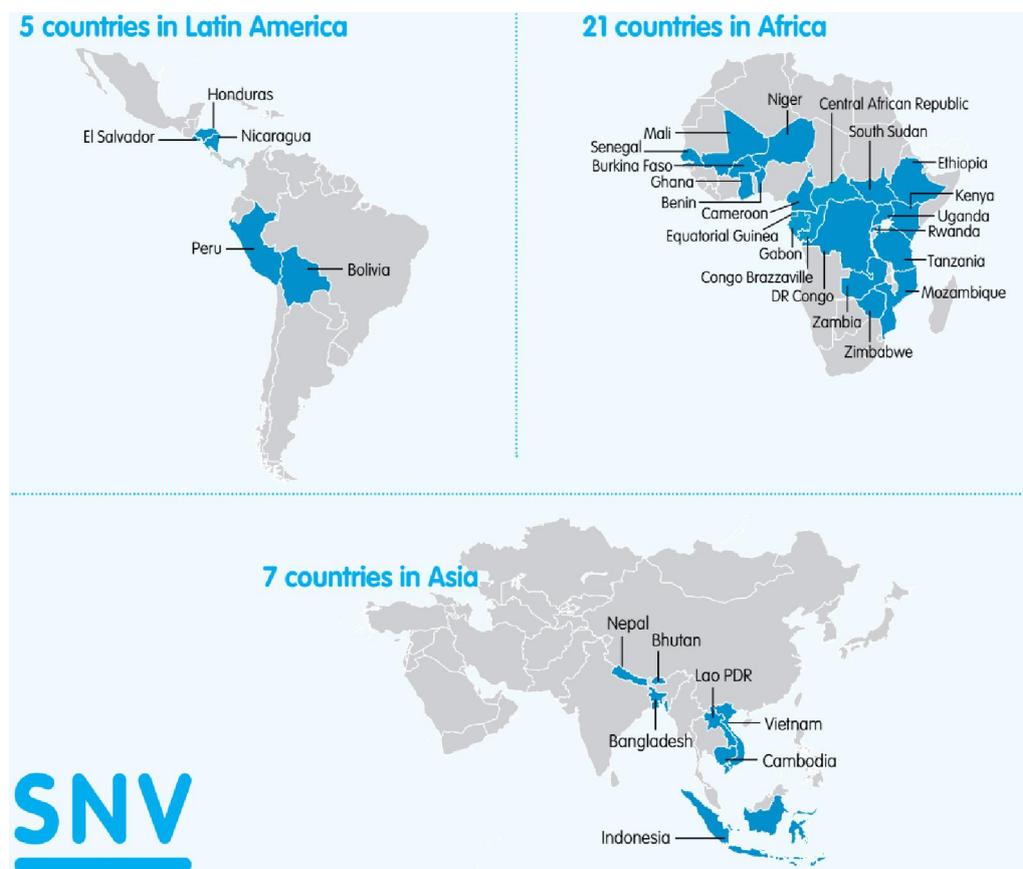
2. Perubahan sistemik, yaitu meningkatkan kinerja untuk menghasilkan dampak yang signifikan.
3. Kepemilikan lokal, yaitu dengan bekerja berdampingan dengan mitra lokal dan menyelaraskan program SNV dengan prioritas pemerintah.
4. Solusi global dalam konteks lokal, yaitu dengan memanfaatkan pengalaman dan pendekatan global yang dimiliki SNV, namun disesuaikan dengan konteks lokal, masyarakat, lingkungan dan kondisi lokal. SNV membagikan pengalaman-pengalaman sukses kami dengan mitra-mitra kami di seluruh dunia. Demikian juga SNV belajar dari pengalaman mitra-mitra lokal.

4.1.4. SNV dan Perwakilannya di Negara-Negara

SNV merupakan jaringan global yang berpusat di Belanda. SNV berkerja dengan membangun jaringan regional, kantor perwakilan organisasi (*host organizations*), dengan berpusat di Belanda. SNV memiliki tiga puluh tiga kantor perwakilan organisasi di negara-negara yang tersebar di tiga kawasan yaitu: (1) lima negara di kawasan Amerika Latin, yang terdiri dari El Savador, Honduras, Nicaragua, Peru, dan Bolivia; (2) tujuh negara di kawasan Asia, yang terdiri dari Nepal, Butan, Bangladesh, Laos, Vietnam, Kamboja, dan Indonesia; dan dua puluh satu negara di kawasan Afrika, yang terdiri dari Niger, Central African Rep., Sudan Selatan, Ethiopia, Kenya,

Uganda, Rwanda, Tanzania, Mozambik, Zimbabwe, Zambia, DR Congo, Congo Brazzaville, Gabon, Equatorial Guinea, Cameroon, Benin, Ghana, Burkinan Faso, Senegal dan Mali (SNV, *Annual Report*, 2015: 3).

Gambar 1.3. berikut menunjukkan persebaran kantor perwakilan SNV di Amerika Latin, Asia dan Afrika.



Gambar 1.3. Persebaran Kantor Perwakilan SNV di Amerika Latin, Asia dan Afrika

Sumber: SNV (2015). *SNV Annual Report 2015*. The Hague: SNV Head Office.

SNV menetapkan peraturan bagi perwakilannya di tiga puluh tiga negara tersebut, yaitu mewajibkan setiap kantor perwakilan SNV untuk senantiasa melakukan pengembangan dan penerapan strategi

global dan bertanggung jawab untuk berkontribusi dalam pencapaian target global. Kantor perwakilan organisasi (*host organizations office*) merupakan bentuk *legal entities* yang dibangun di setiap negara guna melaksanakan dan mengembangkan program-program SNV, serta untuk menjaga keberlangsungan kerja sama regional, nasional maupun lokal (SNV, *Strategy Paper*, 2016: 7). Melalui kerja sama tersebut, SNV dapat bekerja di lebih tiga puluh negara dalam tiga kawasan.

SNV bekerja melalui jaringan global, yang mana setiap kantor perwakilannya dipandu oleh satu tujuan, yaitu berkontribusi terhadap tujuan dan target, serta bekerja untuk seperangkat nilai dan kebijakan yang telah dirumuskan oleh organisasi. Setiap kantor perwakilan dipimpin oleh seorang *country director*, dalam hal ini *country director* SNV Indonesia adalah Phil Harman (SNV Indonesia, <http://www.snv.org/country/indonesia>, akses 11 Oktober 2016). Sementara, kantor pusat SNV di Belanda berfungsi untuk memberikan panduan secara keseluruhan, dukungan dan koordinasi untuk jaringan yang akan dibangun, yang dipimpin oleh *Chief Executive Officer/Chairman of the Board (Managing Board)*, A.P. Van Den Ham yang diawasi oleh *Supervisory Board* yang diketuai oleh J.N.M. Richhelle (SNV, *Annual Report*, 2015: 43-44). Dimana dalam hal ini, *country director* dituntut untuk senantiasa berkoordinasi dengan *Management Board* untuk merumuskan isu dan strategi keseluruhan organisasi.

4.1.5. Pendanaan

Dalam pendanaan, SNV tidak hanya menerima satu pendonor, melainkan terdapat beberapa pendonor yaitu diantaranya Departemen Kerja sama Pembanguna Kementrian Luar Negeri Belanda, Kerajaan Belanda, UKaid, *Bill and Melinda Gates Foundation*, USAID, The World Bank, GIZ, WFP, IFAD, *Asian Development Bank* (ADB), Kerajaan Norwegia, Kementrian Luar Negeri Finlandia, *NYENRODE Business University*, *Lighting Africa*, *Global Green Growth Istitute*, *Conservation International*, *FORD Foundation* dan lainnya (SNV, <http://www.snv.org/donors-partners>, akses 11 Oktober 2016). Selain menjadi pendonor, mereka juga menjadi mitra bagi SNV dalam mewujudkan tujuannya, yaitu pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, terutama bagi negara selatan.

Setiap kantor perwakilan SNV bertanggungjawab untuk memastikan pendanaan yang berkelanjutan untuk kegiatannya, baik secara independen ataupun berkolaborasi di seluruh jaringan. Bentuk tanggungjawab terhadap pendonor atas dana yang telah diberikan kepada SNV untuk melaksanakan program-programnya di tiga puluh delapan negara tersebut adalah melalui pembuatan detail laporan finansial yang dipublikasikan dalam *Annual Report* SNV tiap tahunnya (SNV, <http://www.snv.org/donors-partners>, akses 11 Oktober 2016).

4.2. Gambaran Umum *Sustainable Sanitation and Hygiene for All (SSH4A) in Small Towns Programme*

Sub bab ini akan memberikan gambaran umum mengenai program yang akan diterapkan oleh SNV di Kabupaten Pringsewu, yakni *Sustainable Sanitation and Hygiene for All (SSH4A) in Small Towns Programme*. Paparan akan dimulai dari peluang yang timbul akibat adanya permasalahan sanitasi dan higiene, dilanjutkan dengan pemaparan solusi yang ditawarkan oleh SNV, kemudian akan disajikan paparan mengenai komponen program SSH4A, dan berikut dengan target capaian dalam menerapkan program tersebut.

4.2.1. Peluang

Indonesia memiliki populasi penduduk yang cukup besar, namun hampir 45 persen penduduknya belum memiliki akses terhadap sanitasi yang layak (SNV Indonesia, 2015: 10). Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa 42 juta orang Indonesia masih melakukan BABS di tempat terbuka, dan mayoritas berada di daerah pedesaan. Pemerintah berupaya untuk menurunkan angka ini melalui penancangan program bernama Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) pada tahun 2009. Program ini bertujuan untuk mempromosikan kepada masyarakat luas mengenai lima perilaku kebersihan, sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, yaitu antara lain: (1) menghentikan BABS

di tempat terbuka; (2) mencuci tangan dengan sabun; (3) memelihara kebersihan air minum dan makanan; (4) mengelola limbah padat dengan aman; dan (5) mengelola limbah cair domestik dengan aman. Upaya ini ditujukan untuk mencapai tujuan ke-enam dari SDGs, yaitu sanitasi untuk semua. Sehingga, dengan ini kesehatan lingkungan, masyarakat dan makhluk hidup lain dapat terjaga.

Sejalan dengan program yang dicanangkan pemerintah, SNV sebagai NGO yang fokus terhadap pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan di negara-negara selatan turut serta mendukung kebijakan pemerintah tersebut (SNV Indonesia, 2015: 11). SNV menyadari adanya suatu kebutuhan untuk menyeimbangkan perbedaan budaya dan geografis dengan standar nasional dan memusatkan perhatian pada kelompok masyarakat rentan dan mereka yang tertinggal. Pada umumnya penyediaan layanan sanitasi belum sejalan dengan pertumbuhan kota. Sebagian besar limbah manusia yang berasal dari *septic tank* dan jamban tidak dikelola dengan baik, sehingga mengotori aliran air atau pinggiran tanah, dan hal ini seringkali memengaruhi penghidupan dan kesehatan masyarakat pra-sejahtera (SNV Indonesia, 2015: 11).

4.2.2. Solusi

Untuk mendorong kemajuan sektor sanitasi dan kebersihan, SNV merumuskan suatu program, yaitu “*Sustainable Sanitation and Hygiene for All (SSH4A) in Small Towns Programme*” (SNV,

Strategy Paper, 2016: 10). Tujuan dari program ini ialah untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas kehidupan masyarakat melalui akses terhadap sanitasi yang aman bagi lingkungan dan meningkatkan praktek-praktek kebersihan yang baik. Program ini diterapkan di Indonesia guna mendukung kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam program ini SNV berupaya untuk membangun hubungan kemitraan dengan pemerintah daerah dan para pemangku lainnya di Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Tanggamus di Provinsi Lampung; serta Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat (SNV Indonesia, 2014: 3). Melalui program ini, SNV berusaha untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan umum, terutama pada masyarakat pedesaan yang beresiko tinggi. Pada tingkat nasional, SNV berkolaborasi dengan beberapa instansi terkait, diantaranya dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Nasional (Bappenas).

4.2.3. Komponen Program

Sustainable Sanitation and Hygiene for All (SSH4A) in Small Towns, terutama di Kabupaten Pringsewu memiliki beberapa komponen program yang akan diterapkan, yaitu sebagai berikut (SNV Indonesia, 2014a: 5).

4.2.3.1. *Strengthening Capacity for Steering and Implementation of Sanitation Demand*

Komponen ini merupakan sebuah komponen penting dari pendekatan SNV, yaitu guna membangun kapasitas untuk melaksanakan kegiatan menciptakan permintaan dalam skala dan menciptakan momentum untuk perubahan dengan mempromosikan cakupan kabupaten-yang lebih luas. SNV akan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari provinsi, kabupaten maupun kecamatan sekalipun. Hal itu ditujukan bukan hanya untuk memperkuat kapasitas fasilitasi STBM, tetapi juga untuk merencanakan, memantau dan mengatur pelaksanaannya. Pendekatan SNV ini meliputi penelitian untuk lebih memahami motivasi, nilai-nilai dan kebutuhan yang berbeda kelompok masyarakat, dan untuk bekerja dengan staf pemerintah untuk membangun kebutuhan tersebut ke dalam proses (SNV Indonesia, 2014a: 5).

4.2.3.2. *Strengthening Capacity for Sanitation Supply Chains and Finance*

Mengembangkan beberapa model bisnis untuk usaha pengelolaan lumpur tinja yang penerapannya dilaksanakan oleh kelompok atau masyarakat terlatih (SNV Indonesia, 2014a: 6). Model bisnis tersebut akan disesuaikan dengan kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat. SNV akan memberikan suatu dukungan kapasitas (*capacity building*)

kepada masyarakat atau kelompok yang tertarik untuk menjalankan model tersebut.

4.2.3.3. *Strengthening Capacity for Behavioral Change Communication (BCC) for Hygiene Promotion*

Promosi higiene dimulai dari adanya pemahaman tentang perilaku dan perilaku dari motivator. Pendekatan SSH4A dari SNV ini bekerja untuk memperkenalkan dan membangun kapasitas dalam metodologi komunikasi perubahan perilaku di tingkat lokal dengan adanya keterlibatan aktif dari lembaga lokal dan nasional. Pendekatan yang dilakukan SNV meliputi ulasan partisipatif promosi kesehatan yang telah dilakukan, pemaknaan dari prioritas perilaku berdasarkan data survei yang ada, membangun keahlian dalam penelitian secara formatif, pembangunan strategi BCC, merancang pesan moral dan kampanye, dan pada akhirnya dilakukan pemantauan secara efektif (SNV Indonesia, 2014a: 6).

4.2.3.4. *Strengthening Capacity for Water, Sanitation and Hygiene (WASH) Governance*

Pengalaman SNV menunjukkan bahwa untuk membangun kapasitas dan kepemimpinan dari awal adalah suatu hal yang sangat penting guna menjamin keberlanjutan dan skalabilitas dari tata kelola WASH (SNV Indonesia, 2014a: 7). SNV mendukung strategi nasional, yang dalam hal

ini adalah STBM dan pedoman dalam perencanaan lokal di provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Hal ini akan mendukung lintas sektor dan kolaborasi multi-stakeholder dengan mendorong implementasi dan penyelarasan upaya sanitasi yang berbeda dalam siklus perencanaan regular dan dengan mengintegrasikan insentif berbasis kinerja (SNV Indonesia, 2014a: 8).

Untuk membangun kapasitas pemerintah daerah, SNV akan fokus pada transparansi, pengambilan keputusan secara inklusif dan pengaruh kelompok marginal dalam perencanaan, penganggaran dan proses pemantauan. SNV juga akan mempromosikan pengembangan model pelayanan inklusif yang *pro-poor*, yang dalam hal ini adalah masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat miskin atau masyarakat pra-sejahtera (SNV Indonesia, 2014a: 8).

4.2.3.5. *Performance Monitoring, Learning and Sharing Information*

Pemantauan kinerja merupakan suatu bagian yang penting dari siklus pembelajaran. Inisiatif ini akan mencakup pemantauan kinerja untuk menetapkan tingkat akses ke sanitasi dan higiene (kebersihan), serta kinerja dan kapasitas pemangku kepentingan yang berbeda dalam pemberian layanan (SNV Indonesia, 2014a: 9). Sebuah survei dasar akan dilaksanakan dan didiskusikan dengan mitra guna menginformasikan dan membantu dalam perancangan suatu

proyek. Pemantauan tahunan akan menilai kemajuan dan memberikan pemahaman yang berharga untuk didiskusikan dengan mitra lokal dan bahkan jika dibutuhkan, dapat membantu untuk mendefinisikan area yang akan dimodifikasi ataupun yang harus diperbaiki.

Belajar dan berbagi kegiatan di beberapa kabupaten terpilih dan di Provinsi Lampung akan menginformasikan pendekatan STBM dalam konteks lokal dan mengarahkannya ke isu yang darurat (SNV Indonesia, 2014a: 10). SNV akan mendokumentasikan pendekatan kapasitas pembangunan ke skala STBM, dan akan dibagikan pembelajaran secara aktif dengan sekretariat STBM nasional dan mitra kelompok sanitasi.

4.2.4. Target Capaian

Hasil yang diharapkan dari penerapan *Sustainable Sanitation and Hygiene for All (SSH4A) in Small Towns Programme*, khususnya di Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut (SNV Indonesia, 2014a: 4).

1. Promosi sanitasi dan higiene, yang akan menjangkau 45.000 orang, dengan 70 persen atau sekitar 31.000 orang akan meningkatkan perilaku sanitasi dan higiene mereka.
2. *Open Defecation Free Village (ODF)*, paling tidak satu kecamatan akan ODF di Kabupaten Pringsewu.

3. Peningkatan Sanitasi, akan terdapat 13.000 tambahan orang yang akan mendapatkan akses ke taraf peningkatan sanitasi.
4. Pengembangan layanan sanitasi yang terjangkau oleh masyarakat dan aman bagi lingkungan.
5. Pembelajaran, dokumentasi dan diseminasi kegiatan yang telah berhasil dilakukan di masyarakat melalui forum nasional dan regional yang ada.

4.3. Gambaran Umum Kabupaten Pringsewu

Paparan selanjutnya adalah mengenai gambaran dari daerah yang mana program SSH4A ini akan diterapkan, yakni Kabupaten Pringsewu. Paparan ini dititikberatkan pada pemetaan wilayah administratif Kabupaten Pringsewu.

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tanggamus. Kabupaten Pringsewu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tanggal 26 November 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung dan diresmikan pada tanggal 3 April 2009 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Berdasarkan letak geografis Kabupaten Pringsewu terletak diantara 104045'25" – 10508'42" BT dan 508'10" - 5034'27" LS, dengan luas wilayah sekitar 625 km² atau 62.500 Ha. Sementara, secara administratif Kabupaten Pringsewu berbatasan dengan beberapa wilayah administratif kabupaten lain yaitu yang meliputi:

- utara : berbatasan dengan Kecamatan Sendang Agung dan Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah.
- timur : berbatasan dengan Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Gedongtataan, Kecamatan Waylima dan Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran.
- selatan : berbatasan dengan Kecamatan Bulok dan Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus.
- barat : berbatasan dengan Kecamatan Pugung dan Kecamatan Air Nanning, Kabupaten Tanggamus.

Gambar 1.4. di bawah ini akan memperlihatkan orientasi Kabupaten Pringsewu sebagaimana yang dijelaskan dalam paragraf di atas.

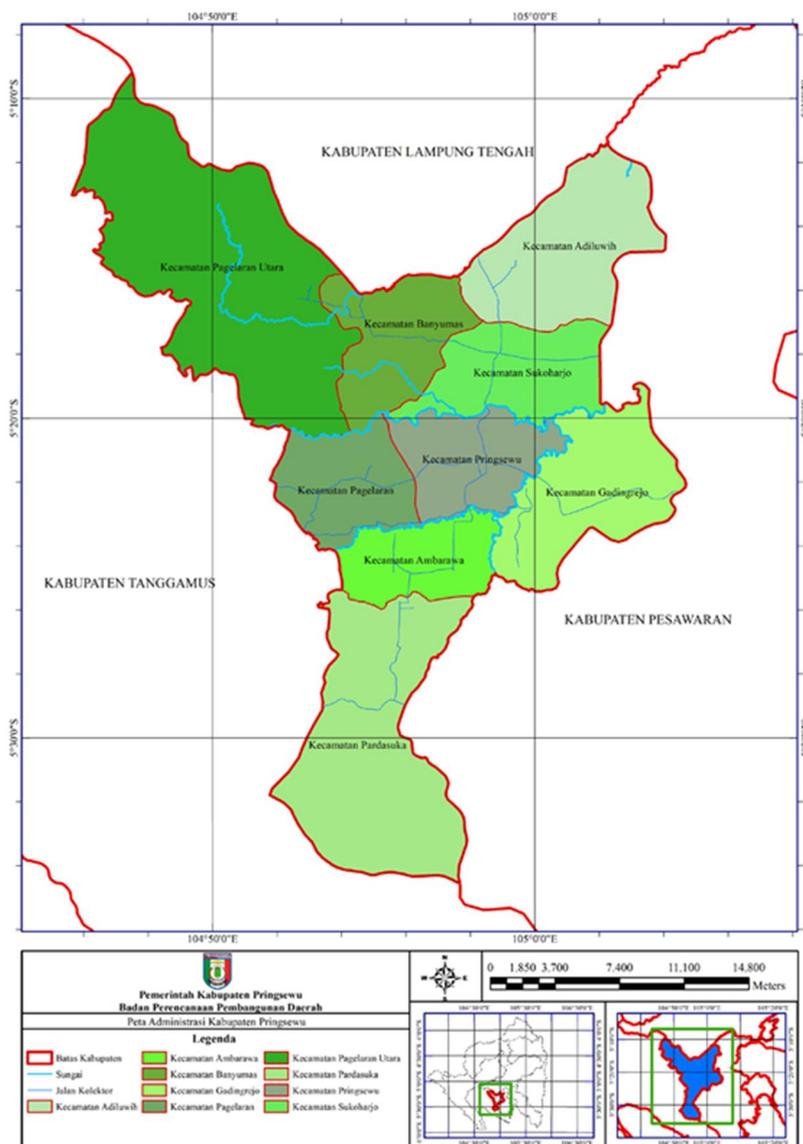


Gambar 1.4. Peta Orientasi Kabupaten Pringsewu

Sumber: Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008

Kabupaten Pringsewu terdiri dari sembilan wilayah kecamatan, yaitu: (1) Pringsewu; (2) Gading Rejo; (3) Pagelaran; (4) Sukoharjo; (5) Ambarawa; (6) Pardasuka; (7) Banyumas; (8) Adiluwih; dan (9) Pagelaran Utara; dengan serratus dua puluh enam pekon dan lima kelurahan berdasarkan UU No. 48 Tahun 2008 bagian kedua tentang cakupan wilayah Kabupaten Pringsewu.

Gambar 1.5. berikut menunjukkan cakupan wilayah administratif Kabupaten Pringsewu.



Gambar 1.5. Peta Administratif Kabupaten Pringsewu

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu (2015)

Demikianlah paparan mengenai kiprah SNV dalam melakukan pembangunan, khususnya di negara berkembang. Dalam hal ini, SNV memfokuskan peranannya pada isu lingkungan, yakni terkait permasalahan sanitasi dan higiene. SNV memaparkan peluang, berikut dengan solusi yang ditawarkan. Bab berikutnya akan memberikan penjelasan tentang peranan SNV dalam menerapkan program SSH4A di Kabupaten Pringsewu.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap peranan *Stichting Nederlandse Vrijwilligers* (SNV) dalam menerapkan *Sustainable Sanitation and Hygiene for All* (SSH4A) in *Small Towns Programme*, melalui analisis dokumen, wawancara, dan observasi terhadap sejumlah pihak, terlihat adanya peranan yang cukup signifikan. Kegiatan yang dilakukan oleh SNV dalam program SSH4A, tidak hanya melakukan upaya meningkatkan akses sanitasi dan higiene, namun juga menggabungkan dengan pengembangan model bisnis inovatif untuk usaha pengelolaan sarana sanitasi dan higiene sebagai mata pencaharian alternatif untuk masyarakat Pringsewu. Dalam penelitian ini, digunakan teori peran dari Mochtar Mas'oeed dan UNEP untuk mengeksplor peranan yang dilakukan SNV dalam program ini dan capaian kerja dalam program ini; dan konsep Keck dan Sikkink untuk memaparkan *networking* yang dibentuk oleh SNV. Adapun temuan-temuan dari penelitian ini memperlihatkan empat poin utama.

1. SNV melakukan enam peranan, yakni: (1) *development and operation of infrastructure*, SNV bekerja sama dengan pendonor untuk meningkatkan akses ke sanitasi sekaligus mendorong pengembangan usaha yang berbasis perekonomian masyarakat, kemudian SNV melakukan kerja sama dengan

kelompok masyarakat dan NGO lokal untuk membantu mewujudkan akses sanitasi bagi semua; (2) *supporting innovation, demonstration, and pilot project*, SNV melakukan pembangunan yang inklusif dengan melibatkan masyarakat pra-sejahtera dan melakukan pendekatan kepemilikan lokal, yaitu dengan berdamai dengan mitra lokal, guna menyelaraskan program SSH4A dengan prioritas pemerintah; (3) *facilitating communication*, SNV melakukan pelbagai metode dan bentuk komunikasi dalam menerapkan SSH4A yaitu *bottom-up communication* dan pendekatan *behavioural change communication*; (4) *technical assistance and training*, SNV memberikan pelatihan kapasitas dan pelatihan teknis, agar program SSH4A ini berkelanjutan; (5) *research, monitoring, and evaluation*, SNV menciptakan sistem PERMOLESI yang menjadi pedoman dalam menerapkan program SSH4A; dan (6) *advocacy for and with the poor*, SNV melakukan advokasi kepada tiga pihak, yaitu masyarakat, pemerintah, dan organisasi sejenis.

2. SNV menggunakan tiga strategi, yaitu: (1) *information politics*, SNV melakukan pelbagai kegiatan dalam mengumpulkan dan penyebaran data serta informasi mengenai kondisi pengelolaan sanitasi dan higiene yang aman dan layak bagi masyarakat kepada mitra kerja sama dalam jejaring; (2) *leverage politics*, SNV melibatkan aktor yang memiliki pengaruh dalam masyarakat Pringsewu, yaitu BANSER, Paguyuban Penggiat dan Pengusaha Sanitasi Jamban Sewu, dan KORAMIL; dan (3) *accountability politics*, SNV bekerja sama dengan LK21 dalam menerapkan program

SSH4A dan mewujudkan tujuan SDGs yaitu sanitasi untuk semua orang (universal).

3. Hambatan dalam penerapan program SSH4A ini lebih besar berasal dari masyarakat, yang mana terdiri dari adanya kebiasaan buruk masyarakat mengenai BABS, tingkat kesadaran masyarakat yang rendah akan pentingnya permasalahan sanitasi dan higiene, serta tingkat kemampuan keuangan masyarakat.
4. Temuan terkait keberhasilan penerapan SSH4A yang akan melihat capaian kerja dari SNV. Promosi untuk mengubah perilaku masyarakat yang dilakukan SNV dalam menerapkan program SSH4A telah berhasil menjangkau 46.330, yang paling tidak dapat menekan angka BABS di setiap pekon/desa. Adanya peningkatan sebesar 43.31 persen terhadap akses ke sanitasi yang aman dan layak. SNV juga telah berhasil mewujudkan pengembangan layanan sanitasi yang terjangkau oleh masyarakat dan aman bagi lingkungan. Selanjutnya, SNV telah berhasil melakukan diseminasi, baik di level lokal, nasional bahkan dalam taraf internasional. Namun, SNV belum dapat berhasil dalam mencapai targetnya untuk mewujudkan ODF paling tidak satu kecamatan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berargumen bahwa penerapan *Sustainable Sanitation and Hygiene for All (SSH4A) in Small Towns Programme* di Kabupaten Pringsewu oleh SNV telah menunjukkan keberhasilan dan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan keenam dari *Sustainable Development Goals*, yaitu sanitasi bagi semua orang. Meskipun belum semua target tercapai, paling tidak sampai dengan saat ini, SNV telah

berhasil meningkatkan akses sanitasi bagi empat belas pekon dari dua puluh dua pekon. Adapun program ini akan terus berlanjut hingga tercapainya ODF di seluruh pekon/desa di Kabupaten Pringsewu. Dalam penelitian ini juga terlihat bahwa pembangunan berkelanjutan dapat diimplementasikan dalam program SSH4A. Dalam hal ini, SNV secara tidak langsung telah menerapkan prinsip-prinsip *sustainable development* dalam kegiatan-kegiatan program SSH4A.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil, maka penulis mengajukan beberapa saran yang kiranya dapat menjadi masukan bagi upaya pewujudan akses sanitasi bagi semua sebagaimana tujuan dari *sustainable development goals*.

1. Untuk SNV, sebagai *non-governmental organizations* (NGOs), SNV memiliki peran yang penting dalam mewujudkan akses sanitasi bagi semua masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Pringsewu diharapkan dapat meningkatkan peranan, terutama *supporting innovation, demonstration, and pilot project* dengan menciptakan inovasi dalam melakukan pengelolaan sanitasi, yakni melalui pembuatan sarana sanitasi yang lebih ramah dengan kaum lanjut usia dan kaum difabel.
2. Jaringan yang telah dibentuk SNV dengan mitra kerja samanya lebih baik dikuatkan lagi, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan keeratan hubungan antara SNV dengan para mitranya, terutama dengan pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu; dan antarmitra kerja sama. SNV diharapkan

juga dapat meningkatkan strategi *information politics* melalui mobilisasi informasi yang lebih luas cakupannya, tidak hanya di tingkat lokal dan nasional, melainkan di tingkat internasional guna memberikan informasi kepada NGO lain, sehingga dapat bekerja bersama-sama dalam mewujudkan sanitasi bagi semua orang.

3. SNV diharapkan dapat menggunakan jaringan yang telah dibentuk untuk meminimalkan hambatan-hambatan yang datang dari masyarakat, dengan terus mendorong, mengajak, dan mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan *awarness* masyarakat terkait sanitasi dan higiene, dan pada akhirnya mengubah kebiasaannya. SNV diharapkan dapat memfasilitasi masyarakat miskin dengan lembaga keuangan non-bank.
4. SNV diharapkan dapat terus meningkatkan promosi dengan melibatkan seluruh mitra kerja sama, terutama dalam hal ini adalah masyarakat yang telah mengubah perilaku BABS-nya, sehingga masyarakat yang menjadi sasaran perubahan dapat terpengaruh dan termotivasi oleh masyarakat yang telah berubah perilakunya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan *Edited Volume*:

- Biddle, W.W. & Biddle, L.J. (1965). *Community Development: The Rediscovery of Local Initiative*. New York: Holt and Winston.
- Dasgupta, P. et.al. (1991). *The Environment and Emergeging development issues*. *WIDER*. pp. 15-18.
- Haryono, E. & Ilkodar, S.B. (2005). *Menulis Skripsi: Panduan untuk Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Heins, V. (2008). *NGO's in International Society: Struggles over Recognition*. New York: Palgrave Macmillan.
- Keck, M.E. & Sikkink, K. (1998). *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. London: Cornell University Press.
- Koponen, J. (2004). 'Development Intervention and Development Studies'. Kotinen, T. (ed.). *Development Intervention*. Helsinki: University of Helsinki.
- Mas'oed, M. (1989). *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teoritisasi*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada.
- (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. LP3ES. Jakarta.
- Mundiatun & Daryanto (2015). *Pengelolaan Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rosenberg, A. & Coser, T. (1976). *An Introduction to International Politics*. New Jersey: Prentice Hall.
- Samuel, R. & Thanikachalam, V. (2003). *Non-Governmental Organizations (NGOs) Spadheading Public Participation in Environmental Issues*. York University.

Steans, J & Pettford, L (2009). *International Relations: Perspectives and Themes*, Sari, S (ed.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sudarto (1995). *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiyono (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Welch, C.E. (1995). *Protecting Human Rights in Africa: Roles and Strategies of Non Governmental Organizations*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Wills, K. (2005). *Theories and Practices of Development*. Canada: Routledge.

Yaziji, M. & Doh, J. (2009). *NGOs and Corporations: Conflict and Collaboration*. Cambridge: Cambridge University.

Yin, R.K. (2009). *Case Study Research: Design and Methods 4^{ed}*. London: Sage Publication.

Internet:

SNV Indonesia (2013). *SNV Indonesia: Country Director*. Diakses pada 11 Oktober 2016 <<http://www.snv.org/country/indonesia>>.

------. *SNV: Donor and Partners*. Diakses pada 11 Oktober 2016 <<http://www.snv.org/donors-partners>>.

Centre for Disease Control and Prevention (2015). *Sanitation and Hygiene*. Diakses pada 5 Agustus 2016 tersedia di <<http://www.cdc.gov/healthywater/global/sanitation/index.html>>.

World Bank (2014). *East Asia Pasific Region Urban Sanitation Review: Actions Needed*. Diakses pada 5 Agustus 2016 tersedia di <<http://www.worldbank.org/en/region/eap/publication/east-asia-pacific-region-urban-sanitation-review-actions-needed>>.

Jurnal:

Grieger, A. (2012). 'Only One Earth: Stockholm and the Beginning of Modern Environmental Diplomacy' in *Environmental and Society Journal*. No. 10.

Korten, D.C. (1987). 'Third Generation NGO Strategies: A Key to People-centered Development' in *World Development* Vol. 15.

Nikkhah, H.A. & Redzuan, M.B. (2010). *The Role of NGOs in Promoting Empowerment for Sustainable Community Development*. Selangor: University Putra Malaysia.

Prayadini, S., Wiranata, I.M.A. & Kawitri, P.T. (2015). *Upaya The Nature Conservancy dalam Konservasi Terumbu Karang dan Lingkungan Pesisir di Kawasan Perairan Nusa Penida, Bali*. Bali: Universitas Udayana.

Santosa, M.A. (1991). 'Aktualisasi Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan dalam Sistem dan Praktek Hukum Nasional' dalam *Jurnal Hukum Lingkungan Tahun III*.

Weiss, E.B. (1991). 'Our Rights and Obligation to future Generation for the Environment' dalam *American Journal of International Law*. Vol. 84.

Laporan dan Publikasi:

Andre, A. (2015). *Peran SurfAid Internasional dalam Penanggulangan Masalah Kesehatan di Mentawai*. Padang: Universitas Andalas.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu. (2013). *Peta Administratif Kabupaten Pringsewu*. Pringsewu: BAPPEDA.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu. (2016). *Pendapatan Regional Kabupaten Pringsewu*. Pringsewu: BAPPEDA & BPS.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu. (2016). *Statistik Daerah Kecamatan Pagelaran 2016*. Pringsewu: BPS.

International NGO Forum on Indonesian Development (2015). *Outcome Document Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. INFID.

Kusumawardhani, K. (2008). *Aksiologi Efomenisme Liberal dalam Reflexive Modernization: Studi Kasus Transnational Environment Activists Organizations dan Peran ProFaunna dalam Mengangkat Diskursus Pelestarian Satwa Liar di Indonesia Periode 1994-2005*. Depok: Universitas Indonesia.

- Qisthiarini, N. (2012). *NGOs and Sustainable Development: The Role of Wetlands International-Indonesia Programme in Rehabilitating Coastal Ecosystem and Livelihoods in Aceh-Nias in 2005-2009*. Depok: Universitas Indonesia.
- SNV (2013). *SNV Annual Report 2013*. The Hague: SNV Head Office.
- (2015). *SNV Annual Report 2015*. The Hague: SNV Head Office.
- (2016). *SNV Strategy Paper 2016-2018*. The Hague: SNV Head Office.
- SNV Indonesia (2013). *SNV: Indonesia*. Jakarta: SNV Indonesia.
- (2014). *Membangun Sanitasi dan Kebersihan yang Berkelanjutan*. Jakarta: SNV.
- (2014a). *Delivering Sustainable Rural Sanitation in Lampung*. Jakarta: SNV.
- (2017). *Laporan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Program SSH4A di Kabupaten Pringsewu*. Jakarta: SNV.
- STBM (2017). *Laporan Kemajuan ODF di Kabupaten Pringsewu: Kecamatan Pagelaran*. Jakarta: STBM.
- The UNEP-International Environment Technology Centre (2003). *Building Professionalism in NGOs/NPOs: Key Issues for Capacity Building*. Osaka: UNEP.
- The World Bank (2014). *Menjawab Tantangan Air Minum dan Sanitasi di Wilayah Perdesaan Indonesia*. Jakarta: R&W Publishing.
- United Nations Children's Fund Indonesia (2012). *Air Bersih, Sanitasi dan Kebersihan*. Jakarta: UNICEF Indonesia.
- World Commission on Environment and Development (WCED). *Our Common Future*. New York: Oxford University Press.
- Yale Center for Environmental Law & Policy (2014). *Environmental Performance Index: Full Report and Analysis*. Yale University: New Heaven.

Wawancara:

Wawancara dengan M. Izzudin, Pringsewu, 1 Desember 2016.

Wawancara dengan Bambang Puji Atmoko, Pringsewu, 1 Desember 2016.

Wawancara dengan Suparlan, Pringsewu, Pringsewu, 1 Desember 2016.

Wawancara dengan Kepala Pekon se-Kecamatan Pagelaran, Pagelaran, 4-11 Desember 2016.

Undang-Undang, Peraturan dan Perjanjian:

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (2013). *Memorandum of Understanding between the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia and Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV) on Integrated and Sustainable Regional Development Program*. Diakses pada 11 Oktober 2016 <http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index?Treaty=&sort=treaty_title.desc&Treaty_page=395>.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dengan Lembaga Asing Non Pemerintah.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Bab I tentang Ketentuan Umum.

Surat Edaran Bupati Pringsewu Nomor 503/165.C/LT.02/2015 tentang Percepatan Pencapaian Pekon/Kelurahan ODF (*Open Defecation Free*)/Stop BABS – Buang Air Besar Sembarangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab I tentang Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung, Bab II tentang Pembentukan dan Batas Wilayah.